

I. PENDAHULUAN

Struktur sosial dipahami sebagai suatu bangunan sosial yang terdiri dari berbagai unsur pembentuk masyarakat. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain dan fungsional. Artinya kalau terjadi perubahan salah satu unsur, unsur yang lain akan mengalami perubahan juga. Unsur pembentuk masyarakat dapat berupa manusia atau individu yang ada sebagai anggota masyarakat, tempat tinggal atau suatu lingkungan kawasan yang menjadi tempat dimana masyarakat itu berada dan juga kebudayaan serta nilai dan norma yang mengatur kehidupan bersama tersebut.

Struktur sosial suatu masyarakat sesungguhnya merupakan proses sosial dan alamiah yang berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Jadi, struktur sosial dalam suatu masyarakat sebenarnya akan memiliki beberapa fungsi. Struktur sosial merupakan instrumen masyarakat yang menyelenggarakan tata kehidupan secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Struktur sosial merupakan karakteristik yang khas dan dimiliki suatu masyarakat sehingga dapat memberikan warna yang berbeda dari masyarakat lainnya. Struktur sosial berfungsi sebagai rantai sistem dalam penyelenggaraan setiap aspek kehidupan sehingga menjadi teratur dan harmonis.

II. PEMBELAJARAN

A. Rencana Belajar Mahasiswa (Kompetensi Dasar)

1. Menjelaskan konsep sistem dan struktur sosial masyarakat Indonesia
2. Menjelaskan perspektif sosiologi dalam melihat struktur masyarakat Indonesia
3. Menjelaskan masyarakat majemuk dan masyarakat multikultural
4. Menjelaskan sistem dan struktur masyarakat Indonesia dan pengaruhnya pada sistem kepartaian

5. Menjelaskan integrasi, disintegrasi dan reintegrasi masyarakat Indonesia
6. Menjelaskan stratifikasi dan diferensiasi sosial dalam masyarakat Indonesia
7. Menjelaskan masyarakat desa dan masyarakat kota di Indonesia
8. Menjelaskan isu-isu krusial dalam sistem dan struktur sosial Indonesia
9. Wanita dalam struktur sosial masyarakat Indonesia
10. Kajian tentang struktur sosial masyarakat Minangkabau sebuah kasus

III. KEGIATAN BELAJAR

1. Kegiatan Belajar 1

a. Learning Outcome:

(1) Standar Kompetensi

Menjelaskan hakekat sistem dan struktur sosial masyarakat indonesia

(2) Kompetensi Dasar

- Menjelaskan konsep dasar sistem sosial
- Menjelaskan konsep dasar struktur sosial
- Menjelaskan sistem dan struktur sosial Indonesia

b. Uraian Materi

SISTEM DAN STRUKTUR SOSIAL

Sistem sosial adalah suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen sosial. Elemen-elemen sosial itu terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu-individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam sistem sosial terdapat individu-individu yang berinteraksi dan bersosialisasi sehingga tercipta hubungan-hubungan sosial. Keseluruhan hubungan sosial tersebut membentuk struktur sosial dalam kelompok maupun masyarakat yang akhirnya akan menentukan corak masyarakat tersebut. Suatu sistem sosial tidak hanya berupa kumpulan individu. Sistem sosial juga berupa hubungan-hubungan sosial dan sosialisasi yang membentuk nilai-nilai dan adat-istiadat sehingga terjalin kesatuan hidup bersama yang bersifat teratur dan berbentuk secara berkesinambungan

Menurut **Selo Soemardjan** mengacu pendapat **Loomis** suatu sistem sosial harus terdiri atas sembilan unsur sebagai berikut: (1). **Kepercayaan dan Pengetahuan**; Unsur kepercayaan dan pengetahuan merupakan unsur yang paling penting dalam sistem sosial karena perilaku anggota dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka yakini dan apa yang mereka ketahui tentang kebenaran, sistem religi, dan cara-cara penyembahan kepada sang pencipta. (2). **Perasaan**; Perasaan adalah keadaan jiwa manusia yang berkenaan dengan situasi alam sekitarnya termasuk di dalamnya sesama manusia. Perbedaan latar belakang

budaya suatu masyarakat akan membedakan keadaan kejiwaan masyarakat yang membentuk suatu sistem sosial. Perasaan terbentuk melalui hubungan yang menghasilkan situasi kejiwaan tertentu yang bila sampai pada tingkat tertentu harus dikuasai agar tidak terjadi ketegangan jiwa yang berlebihan. (3). **Tujuan** Dalam setiap tindakannya manusia mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut, yaitu suatu hasil akhir atas suatu tindakan dan perilaku seseorang yang harus dicapai melalui perubahan maupun dengan cara mempertahankan suatu keadaan yang sudah bagus. (4). **Norma/Kaidah/Peraturan Sosial**; Norma adalah pedoman-pedoman tentang perilaku yang diharapkan atau pantas menurut kelompok atau masyarakat. Norma-norma sosial merupakan patokan tingkah laku yang diwajibkan atau dibenarkan dalam situasi-situasi tertentu dan merupakan unsur paling penting untuk meramalkan tindakan manusia dalam sistem sosial. Norma-norma sosial dipelajari dan dikembangkan melalui sosialisasi sehingga menjadi pranata-pranata sosial. (5). **Kedudukan (Status) dan Peran (Role)** Kedudukan adalah posisi seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestasi, hak-hak, serta kewajibannya. Kedudukan menentukan apa yang harus seseorang perbuat bagi masyarakat.

Di dalam setiap sistem sosial dijumpai bermacam-macam kedudukan baik yang diperoleh secara turun-temurun, dengan usaha sendiri maupun kedudukan yang diberikan sebagai penghargaan dari lingkungan sendiri, sedangkan peran (*role*) adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. (6). **Tingkat/Pangkat**: Pangkat berkaitan dengan kedudukan dan peranan seseorang dalam masyarakat. Seseorang dengan pangkat tertentu berarti mempunyai proporsi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Pangkat diperoleh setelah melalui penilaian terhadap perilaku seseorang yang menyangkut pendidikan, pengalaman, keahliannya, pengabdian, kesungguhannya, dan ketulusan perbuatan yang dilakukannya. (7). **Kekuasaan**: Kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak-pihak lain. Kalau seseorang diakui oleh masyarakat sekitarnya maka itulah yang disebut

wewenang. (8). **Sanksi**: Sanksi adalah suatu bentuk imbalan yang diberikan terhadap seseorang atas perilakunya. Sanksi dapat berupa hadiah dan dapat pula berupa hukuman. Sanksi diberikan oleh masyarakat untuk menjaga tingkah laku para masyarakat supaya sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap masyarakat akan menerapkan sanksi baik yang positif maupun sanksi yang negatif kepada anggotanya, tetapi wujud dan tingkatan sanksi yang diberikan sangat tergantung pada peradaban masyarakat tersebut. Dan (9). **Fasilitas (Sarana)**: Fasilitas adalah semua bentuk cara, jalan, metode, benda-benda yang digunakan manusia untuk menciptakan tujuan sistem sosial itu sendiri. Fasilitas di sini sama dengan sumber daya material yang berupa gagasan atau ide. Menurut **Sello Soemardjan** mengacu pendapat **Talcott Parson**, unsur-unsur dalam suatu sistem sosial itu paling sedikit terdiri atas empat subsistem, yaitu sebagai berikut. (a). **Subsistem Kebudayaan** Subsistem ini menghasilkan kebudayaan kebendaan, sistem ilmu pengetahuan, dan sistem nilai budaya atau adat istiadat. (b). **Subsistem Sosial** Subsistem sosial ini menghasilkan nilai-nilai, norma-norma, dan kaidah-kaidah sosial yang melekat dalam setiap perilaku manusia. (c). **Subsistem Kepribadian** Subsistem kepribadian menghasilkan corak perilaku masyarakat sebagai akibat interaksi sosial dan sosialisasi yang terus-menerus. (d). **Subsistem Kelompok Biologis**; Subsistem biologis ini berkenaan dengan perlakuan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Struktur sosial mencakup susunan status dan peran yang terdapat di dalam satuan sosial, ditambah nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur interaksi antarstatus dan peran sosial. Di dalam struktur sosial terdapat unsur-unsur sosial seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Melalui proses sosial unsur-unsur sosial itu terbentuk, berkembang, dan dipelajari oleh individu dalam masyarakat. Proses sosial itu sendiri adalah hubungan timbal balik antara bidangbidang kehidupan dalam masyarakat dan memahami norma-norma yang berlaku di masyarakat

Struktur selalu merujuk pada unsur-unsur yang bersifat kurang lebih tetap atau mantap. Kalau kita umpamakan dengan sebuah bangunan rumah, maka

dindingdinding rumah itu merupakan strukturnya. Dalam pengertian ini, struktur sosial diartikan sebagai pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Istilah struktur juga dapat diterapkan pada interaksi sosial. Jadi, struktur sosial dapat diartikan sebagai jalinan unsur-unsur sosial yang pokok. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya.

Struktur merujuk pada pola interaksi tertentu yang kurang lebih tetap dan mantap, yang terdiri dari jaringan relasi-relasi sosial hierarkis dan pembagian kerja, serta dilandasi oleh kaidahkaidah, peraturan-peraturan, dan nilai-nilai sosial budaya. Setiap manusia terkait dengan struktur masyarakat di mana ia menjadi anggotanya. Artinya, setiap orang termasuk ke dalam satu atau lebih kelompok, kebudayaan, lembaga sosial, pelapisan sosial, kekuasaan, dan wewenang yang terdapat di dalam masyarakat.

Hal ini terjadi karena manusia mempunyai beragam kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan ekonomi, politik, hukum, sosial, dan lain-lain, serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu pun juga beragam. Untuk memenuhinya, manusia memerlukan interaksi sosial dengan pihak lain atau lembaga yang menyediakannya. Interaksi sosial merupakan salah satu wujud dari sifat manusia yang hidup bermasyarakat. Sebagai anggota masyarakat, manusia tertata dalam struktur sosial atau jaringan unsur-unsur sosial yang ada dalam masyarakat. Unsur-unsur itu mencakup kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, pelapisan sosial, kekuasaan, dan wewenang. Kemudian, unsur-unsur tadi berhubungan dengan berbagai segi kehidupan, seperti ekonomi, politik, hukum, sosial dan lain-lain, serta saling memengaruhi. Misalnya, segi ekonomi selalu berhubungan dengan politik, segi politik selalu berhubungan dengan hukum, dan seterusnya.

Untuk memahami lebih jauh mengenai apa itu struktur sosial, mari kita pelajari bersama pengertian struktur sosial menurut pendapat para ahli sosiologi berikut ini.

- a. George C. Homan, Mengaitkan struktur sosial dengan perilaku elementer (mendasar) dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Talcott Parsons, Berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antarmanusia.
- c. Coleman, Melihat struktur sosial sebagai sebuah pola hubungan antarmanusia dan antarkelompok manusia.
- d. Kornblum, Menekankan konsep struktur sosial pada pola perilaku individu dan kelompok, yaitu pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat.
- e. Soerdjono Soekanto, Melihat struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan.
- f. Abdul Syani, Melihat struktur sosial sebagai sebuah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial yang pokok, seperti kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, dan wewenang.
- g. Gerhard Lenski, Mengatakan bahwa struktur sosial masyarakat diarahkan oleh kecenderungan panjang yang menandai sejarah.

2. Unsur-Unsur Struktur Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam suatu masyarakat yang tertata dalam suatu struktur yang cenderung bersifat tetap. Tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat itu diharapkan dapat berfungsi dengan baik, sehingga akan tercipta suatu keteraturan, ketertiban, dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Untuk mewujudkannya diperlukan adanya unsur-unsur tertentu.

Apa saja unsur yang terdapat dalam suatu struktur sosial dalam masyarakat? Menurut Charles P. Loomis, struktur sosial tersusun atas sepuluh unsur penting berikut ini.

- a. Adanya pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh para anggota masyarakat yang berfungsi sebagai alat analisis dari anggota masyarakat.

- b. Adanya perasaan solidaritas dari anggota-anggota masyarakat
- c. Adanya tujuan dan cita-cita yang sama dari warga masyarakat.
- d. Adanya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dijadikan sebagai patokan dan pedoman bagi anggota masyarakat dalam bertingkah laku.
- e. Adanya kedudukan dan peranan sosial yang mengarahkan pola-pola tindakan atau perilaku warga masyarakat.
- f. Adanya kekuasaan, berupa kemampuan memerintah dari anggota masyarakat yang memegang kekuasaan, sehingga sistem sosial dapat berlanjut.
- g. Adanya tingkatan dalam sistem sosial yang ditentukan oleh status dan peranan anggota masyarakat.
- h. Adanya sistem sanksi yang berisikan ganjaran dan hukuman dalam sistem sosial, sehingga norma tetap terpelihara.
- i. Adanya sarana atau alat-alat perlengkapan sistem sosial, seperti pranata sosial dan lembaga.
- j. Adanya sistem ketegangan, konflik, dan penyimpangan yang menyertai adanya perbedaan kemampuan dan persepsi warga masyarakat.

3. Fungsi Struktur Sosial

Dalam sebuah struktur sosial, umumnya terdapat perilaku-perilaku sosial yang cenderung tetap dan teratur, sehingga dapat dilihat sebagai pembatas terhadap perilaku-perilaku individu atau kelompok. Individu atau kelompok cenderung menyesuaikan perilakunya dengan keteraturan kelompok atau masyarakatnya. Seperti dikatakan di atas, bahwa struktur sosial merujuk pada suatu pola yang teratur dalam interaksi sosial, maka fungsi pokok dari struktur sosial adalah menciptakan sebuah keteraturan sosial yang ingin dicapai oleh suatu kelompok masyarakat.

Sementara itu, Mayor Polak menyatakan bahwa struktur sosial dapat berfungsi sebagai berikut.

- (a). Pengawas sosial, yaitu sebagai penekan kemungkinan-kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat. Misalnya

pembentukan lembaga pengadilan, kepolisian, lembaga adat, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lain-lain.(b). Dasar untuk menanamkan suatu disiplin sosial kelompok atau masyarakat karena struktur sosial berasal dari kelompok atau masyarakat itu sendiri. Dalam proses tersebut, individu atau kelompok akan mendapat pengetahuan dan kesadaran tentang sikap, kebiasaan, dan kepercayaan kelompok atau masyarakatnya. Individu mengetahui dan memahami perbuatan apa yang dianjurkan oleh kelompoknya dan perbuatan apa yang dilarang oleh kelompoknya.

4. Ciri-Ciri Struktur Sosial

Segala sesuatu pasti memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakan dengan sesuatu yang lain. Misalnya masyarakat desa mempunyai ciri-ciri tersendiri, seperti bersifat gotong royong, mengutamakan kebersamaan, tidak ada spesialisasi dalam pembagian kerja, dan lain-lain yang membedakan dengan masyarakat perkotaan yang cenderung individualistis dan adanya pembagian pekerjaan sesuai dengan keahlian. Begitupun juga dalam struktur sosial.

Abdul Syani menyebutkan bahwa ada beberapa ciri struktur sosial, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang dapat memberikan bentuk dasar pada masyarakat dan memberikan batas-batas pada aksi-aksi yang kemungkinan besar dilakukan secara organisatoris.
- b. Struktur sosial mencakup semua hubungan sosial di antara individu-individu pada saat tertentu. Artinya segala bentuk pola interaksi sosial dalam masyarakat telah tercakup dalam suatu struktur sosial.
- c. Struktur sosial merupakan seluruh kebudayaan masyarakat. Artinya semua karya, cipta, dan rasa manusia sebagai anggota masyarakat merupakan aspek dari struktur sosial. Misalnya komputer, alat-alat pertanian modern, mobil, pesawat, kesenian, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

d. Struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis, sehingga dapat dilihat sebagai kerangka tatanan dari berbagai bagian tubuh yang membentuk struktur. Misalnya dalam sebuah organisasi terdapat ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang kesemuanya membentuk suatu struktur.

e. Struktur sosial merupakan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat yang mengandung dua pengertian, yaitu sebagai berikut.

1) Pertama, di dalam struktur sosial terdapat peranan yang bersifat empiris dalam proses perubahan dan perkembangan.

2) Kedua, dalam setiap perubahan dan perkembangan tersebut terdapat tahap perhentian, di mana terjadi stabilitas, keteraturan, dan integrasi sosial yang berkesinambungan sebelum kemudian terancam oleh proses ketidakpuasan dalam tubuh masyarakat.

5. Elemen Dasar Struktur Sosial

Pada dasarnya, struktur sosial memiliki empat komponen atau elemen dasar, yaitu status sosial, peranan, kelompok, dan institusi.



Bagan 3.1 Elemen dasar struktur sosial.

*Dalam proses interaksi sosial tersebut, muncul apa yang dinamakan sebuah penghargaan terhadap sesuatu hal. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap sesuatu hal menyebabkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi. Gejala tersebut menyebabkan timbulnya lapisan sosial dalam masyarakat yang merupakan pembedaan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Hal ini pernah disampaikan oleh **Pitirim Sorokin** yang menyebutkan bahwa sistem lapisan dalam masyarakat merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Siapa yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah banyak dianggap oleh masyarakat mempunyai kedudukan dalam lapisan atas. Selain pembedaan masyarakat secara hierarkis kita juga mengenal pembedaan sosial yang sifatnya tidak hierarkis yaitu pembedaan agama, ras, suku bangsa, dan jenis kelamin. Nah pembedaan-pembedaan dalam masyarakat secara horisontal maupun vertikal merupakan bagian struktur sosial yang ada dalam*

masyarakat.

Struktur sosial mempunyai beragam bentuk di dalam masyarakat. *Bentuk-bentuk struktur sosial tersebut adalah pelapisan sosial, stratifikasi sosial, dan diferensiasi sosial.* Yang membedakan ketiga bentuk tersebut merupakan status dan peran yang dimiliki setiap individu di dalam masyarakat. Akan tetapi secara prinsipil bentuk-bentuk tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga macam kelas, yaitu kelas ekonomis, kelas politis, dan yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat.

RANGKUMAN

Dalam sebuah struktur sosial, umumnya terdapat perilaku-perilaku sosial yang cenderung tetap dan teratur, sehingga dapat dilihat sebagai pembatas terhadap perilaku-perilaku individu atau kelompok. Individu atau kelompok cenderung menyesuaikan perilakunya dengan keteraturan kelompok atau masyarakatnya. Seperti dikatakan di atas, bahwa struktur sosial merujuk pada suatu pola yang teratur dalam interaksi sosial, maka fungsi pokok dari struktur sosial adalah menciptakan sebuah keteraturan sosial yang ingin dicapai oleh suatu kelompok masyarakat.

Evaluasi

Dilakukan dengan tes tertulis melalui soal essay:

1. Jelaskan konsep sistem sosial
2. Jelaskan konsep struktur sosial
3. Buat perbedaan sistem sosial dan struktur sosial dari segi unsur
4. Jelaskan bentuk-bentuk struktur sosial dalam kehidupan nyata

2. Kegiatan Belajar 2

a. Learning Outcome:

(1) Standar Kompetensi

- Menjelaskan pandangan sosiologi terhadap sistem dan struktur masyarakat Indonesia

(2) Kompetensi Dasar

- Menjelaskan gambaran umum struktur sosial masyarakat Indonesia
- Menganalisis struktur sosial masyarakat Indonesia dengan perspektif fungsionalisme
- Menganalisis struktur sosial masyarakat Indonesia dengan perspektif konflik

b. Uraian Materi

PERSPEKTIF SOSIOLOGIS TERHADAP STRUKTUR SOSIAL INDONESIA

1. Gambaran struktur sosial masyarakat Indonesia

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang unik, yaitu (1) secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan sukubangsa, agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Sedangkan (2) secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Perbedaan-perbedaan sukubangsa, agama, adat, dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, suatu istilah yang mula-mula dikenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda. Konsep masyarakat majemuk sebagaimana yang digunakan oleh ahli-ahli ilmu kemasyarakatan dewasa ini memang merupakan perluasan dari konsep Furnivall tersebut.

2. Perspektif sosiologi dalam melihat struktur sosial masyarakat Indonesia

a. Perspektif Fungsionalisme

Tokoh-tokoh perpektif ini yang dikenal luas antara lain: Talcott Parsons, Neil Smelser. Ciri pokok perspektif ini adalah gagasan tentang kebutuhan masyarakat (*societalneeds*). Masyarakat sangat serupa dengan organisme biologis, karena mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat melangsungkan keberadaannya atau setidaknya berfungsi dengan baik. Ciri dasar kehidupan sosial struktur sosial muncul untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan merespon terhadap permintaan masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Asumsinya adalah ciri-ciri sosial yang ada memberi kontribusi yang penting dalam mempertahankan hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat atau subsistem utama dari masyarakat tersebut.

Pemahaman seperti ini dalam pandangan **Talcott Parsons** menghantarkan kita untuk memahami masyarakat manusia dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia.

a. Struktur tubuh manusia memiliki berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai kelembagaan yang saling terkait dan tergantung satu sama lain.

b. Oleh karena setiap bagian tubuh manusia memiliki fungsi yang jelas dan khas, demikian pula setiap bentuk kelembagaan dalam masyarakat. Setiap lembaga dalam masyarakat melaksanakan tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat tersebut. **Functional imperative** menggambarkan empat tugas utama yang harus dilakukan agar masyarakat tidak mati yaitu : *Adaptation to the environment*, Contoh lembaga ekonomi

“ *Goal attainment*; Contoh pemerintah bertugas untuk mencapai tujuan umum

“ *Integration*; **Contoh : lembaga hukum, dan lembaga agama**

“*Latency*; Contoh: keluarga dan lembaga pendidikan bertugas untuk usaha pemeliharaan.

Analogi dengan tubuh manusia mengakibatkan Parsons merumuskan konsep keseimbangan **dinamis-stasioner**, jika satu bagian tubuh manusia berubah maka bagian lain akan mengikutinya. Demikian juga dengan masyarakat, masyarakat selalu mengalami perubahan tetapi teratur. Perubahan sosial terjadi pada satu lembaga akan berakibat perubahan di lembaga lain untuk mencapai keseimbangan baru.

Berikutnya Parsons merumuskan konsep faktor kebakuan dan pengukur (*pattern variables*) untuk menjelaskan perbedaan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Faktor kebakuan dan pengukur ini menjadi alat utama untuk memahami hubungan sosial yang berlangsung berulang dan terwujud dalam sistem kebudayaan. Faktor tersebut adalah: (1) *Affective vs Effective-Neutral*; Masyarakat tradisional cenderung memiliki hubungan yang pribadi dan emosional, sedangkan masyarakat modern memiliki hubungan kenetralan yaitu hubungan kerja yang tidak langsung dan menjaga jarak. (2) *Particularistic vs Universalistic*; Masyarakat tradisional cenderung untuk berhubungan dengan anggota masyarakat dari kelompok lain sehingga ada rasa untuk memikul tanggungjawab bersama. Masyarakat modern berhubungan satu sama lain dengan batas norma-norma universal yang pribadi, (3) *Collective vs Self Orientation*; Masyarakat tradisional biasanya memiliki kewajiban-kewajiban kekeluargaan, komunitas dan kesukuan. Masyarakat modern lebih bersifat individualistic, (4) *Ascription vs Achievement*; Masyarakat tradisional memandang penting status bawaan dan warisan, masyarakat modern tumbuh dalam persaingan yang ketat dan dinilai melalui prestasi (5) *Functional Difused vs Functionally Specific*; Masyarakat tradisional belum merumuskan fungsi kelembagaan secara jelas. Masyarakat modern sudah jelas merumuskan tugas kelembagaannya. Dari sejumlah asumsi dasar tersebut maka secara esensial pendekatan ini mengkaji kehidupan sosial manusia sebagai berikut:

- a) Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan tergantung satu sama lain, serta setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.
- b) Setiap bagian dari suatu masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.
- c) Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu. Mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.
- d) Masyarakat cenderung mengarah pada suatu keseimbangan (*equilibrium*) dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercipta harmoni atau stabilitas.
- e) Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat, tetapi bila itu terjadi, maka perubahan itu pada umumnya akan membawa kepada konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

b. Perspektif Konflik

Manusia membuat sejarah; sejarah yang kita buat selalu terjadi dalam suasana interaksi dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang keberadaannya diciptakan dalam acuan interaksi sosial. Karena itu beberapa pemikir melihat interaksi sosial sebagai mekanisme yang mengerjakan perubahan, terutama mengerjakan konflik. Beberapa tokoh seperti **Ibnu Khaldun, Karl Marx, Vilfredo Pareto** melihat jalannya sejarah didorong oleh konflik antar manusia.

Perhatian manusia terhadap konflik telah tercermin dalam literatur kuno. Max Weber menyatakan *perang antar dewa di zaman kuno bukan hanya untuk melindungi*

kebenaran nilai-nilai kehidupan sehari-hari, tetapi juga keharusan memerangi dewa-dewa lain, sebagai komunitas mereka juga berperang dan dalam peperangan inipun mereka harus membuktikan kemahakuasaan mereka. Sebagai contoh dalam mitologi Yunani mengenal **Ares** dewa perang yang dibenci oleh dewa-dewa lain karena sifatnya yang kejam, saudara perempuannya **Eris** adalah dewi perpecahan yang gemar bertengkar dan berperang. Rekannya dari Romawi adalah **Mars** dan **Discordia**. Sejumlah pengamat politik dan sosial lain menekankan pentingnya konflik dalam kehidupan manusia; antara lain Polybius sejarawan Romawi, Khaldun, Machiavelli, Jean Bodin dan Thomas Hobbes.

Konflik antar kepentingan diri sendiri dan kepentingan sosial meliputi karya **Adam Smith**, temuan **Charles Darwin** yang menyatakan bahwa “*Yang kuatlah yang paling beruntung dalam perjuangan mempertahankan hidup.*” Ide Darwin diterapkan pada tatanan sosial dalam ideologi sosial Darwinisme, yang mula-mula menerapkannya adalah **Herbert Spencer** dan **WG Sumner**. Mereka menyatakan apa yang kemudian diakui sebagai landasan pembenaran ilmiah bagi praktik bisnis yang kejam dari kapten industri abad 19. Para kapten industri adalah anggota masyarakat yang *terkuat* dan orang yang *kurang mampu yang tidak cakap* harus menerima nasib mereka demi kesejahteraan masyarakat.

Jadi, evolusi sosial dibayangkan sejalan dengan evolusi biologis. Orang yang mampu bertahan hidup terbukti adalah orang yang terkuat. Di Amerika abad 19, kapten industri adalah mereka yang terkuat, pemenang dari perjuangan keras untuk mempertahankan hidup dalam dunia bisnis. Pandangan tersebut yang kemudian mendasari asumsi bahwa evolusi sosial dan kultural sepenuhnya adalah hasil dari konflik antar kelompok. Perang antar kelompok dapat disamakan dengan perjuangan untuk mempertahankan hidup dan yang terkuatlah yang menang dalam kehidupan sosial. Kebencian yang besar dan yang melekat antar kelompok, antar ras dan antar orang yang berbeda menyebabkan konflik tak terelakan. Penaklukan dan pemuasan

kebutuhan melalui pemerasan tenaga kerja dan ditaklukan merupakan tema besar sejarah manusia.

Vilfredo Pareto melukiskan sejarah sebagai perjuangan memperebutkan kekuasaan yang tak berkesudahan, kelompok dominan berusaha memelihara dan mempertahankan kedudukannya; kekuatan adalah faktor terpenting dalam mempertahankan stabilitas, kekerasan mungkin diperlukan untuk memulihkan keseimbangan sosial jika keseimbangan itu terganggu. Kekerasan tidak memerlukan pembenaran moral, karena kekerasan mempunyai kualitas pembaharuan membebaskan manusia untuk mengikuti ketentuan tak rasional dari sifat bawaannya sendiri.

Albion Small dan **Lester Ward** menegaskan bahwa setiap jenis struktur apakah inorganik, organik atau sosial diciptakan oleh interaksi kekuatan-kekuatan yang bersifat antagonis. Interaksi demikian merupakan hukum universal dan hukum itu berarti bahwa struktur terus menerus berubah, mulai dari tingkat primordial yang sangat sederhana hingga ke tingkat kedua yang lebih rumpil. Berbeda dengan pandangan Pareto, **Ward** tidak menghubungkan konflik antar kelompok dengan kebencian bawaan tetapi lebih disebabkan pelanggaran tak terelakkan oleh satu kelompok atas hak dan wilayah kelompok lain. Dari konflik antar kelompok ini munculah negara dan konflik antar negara memperbesar efisiensi sosial dan meningkatkan peradaban.

Menurut **Dahrendorf**, konflik sosial mempunyai sumber struktural yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial, dengan kata lain konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut konflik tentang keabsahan hubungan kekuasaan yang ada.

- 1) Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perspektif ini memiliki proporsi sebagai berikut :
- 2) Setiap masyarakat dalam segala hal tunduk pada proses perubahan; perubahan sosial terjadi dimana saja.

- 3) Setiap masyarakat dalam segala hal memperlihatkan ketidaksesuaian dan konflik; konflik sosial terdapat dimana saja.
- 4) Setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi terhadap perpecahan dan perubahannya
- 5) Setiap masyarakat berdasarkan atas penggunaan kekerasan oleh sebagian anggotanya terhadap anggota yang lain.

RANGKUMAN

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang unik, yaitu (1) secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan sukubangsa, agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Sedangkan (2) secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

EVALUASI

1. Jelaskan bagaimana gambaran umum struktur sosial masyarakat Indonesia
2. Jelaskan bagaimana struktur sosial masyarakat Indonesia dari perspektif fungsionalisme
3. Jelaskan bagaimana struktur sosial masyarakat Indonesia dari perspektif konflik

3. Kegiatan Belajar 3

a. Learning Outcome:

(3) Standar Kompetensi

- Menjelaskan struktur masyarakat Majemuk Indonesia

(4) Kompetensi Dasar

- Menjelaskan konsep masyarakat majemuk
- Menjelaskan faktor penyebab terjadinya kemajemukan
- Menganalisis tentang fakta-fakta kemajemukan masyarakat Indonesia

c. Uraian Materi

STRUKTUR MASYARAKAT MAJEMUK DI INDONESIA

Masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda, demikianlah menurut Furnivall, merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam kesatuan politik (JS Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge at The University Press, 1967, halaman 446-469).

Istilah plural atau majemuk sebenarnya berbeda dengan pengertian heterogen. Majemuk atau plural itu merupakan lawan dari kata singular atau tunggal. Sehingga, masyarakat plural itu bukan masyarakat yang tunggal. Masyarakat tunggal merupakan masyarakat yang mendukung satu sistem kebudayaan yang sama, sedangkan pada masyarakat plural, di dalamnya terdapat lebih dari satu kelompok baik etnik maupun sosial yang menganut sistem kebudayaan (subkultur) berbeda satu dengan yang lain. Sebuah masyarakat kota, mungkin tepat disebut sebagai masyarakat heterogen, sepanjang meskipun mereka berasal dari latar belakang SARA (sukubangsa, agama, ras, atau pun aliran/golongan-golongan) yang berbeda, tetapi mereka tidak mengelompok berdasarkan SARA tersebut. Heterogen lawan dari kondisi yang disebut homogen. Disebut homogen kalau

anggota masyarakat berasal dari SARA yang secara relatif sama. Disebut heterogen kalau berasal dari SARA yang saling berbeda, namun –sekali lagi– mereka tidak mengelompok (tersegmentasi) berdasarkan SARA tersebut.

Sebagai suatu masyarakat majemuk, Furnivall menyebut Indonesia ketika itu sebagai suatu tipe masyarakat tropis di mana mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Orang-orang Belanda sebagai golongan minoritas merupakan penguasa yang memerintah bagian amat besar orang-orang Indonesia pribumi yang menjadi golongan kelas tiga di negerinya sendiri. Golongan keturunan Tionghoa, sebagai golongan terbesar di antara orang-orang keturunan Timur Asing lainnya, menempati kedudukan di antara kedua golongan tersebut.

Di dalam kehidupan politik, pertanda paling jelas dari masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk itu adalah tidak adanya kehendak bersama (*common will*); masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan terdiri atas elemen-elemen yang terpisah satu sama lain oleh karena perbedaan ras, masing-masing lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada sebagai suatu keseluruhan yang organis.

Orang-orang Belanda datang ke Indonesia untuk bekerja saja, mereka tidak menetap di Indonesia. Kehidupannya semata-mata adalah di sekitar pekerjaannya saja. Mereka memandang masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya di Indonesia, tidak sebagai warga masyarakat, apalagi warga negara, melainkan sebagai kapitalis atau majikan dari buruh-buruh mereka. Banyak memang di antara mereka yang tinggal di Indonesia sampai kira-kira 20 tahun, tetapi kemudian lebih suka menghabiskan hari tuanya di negeri Belanda.

Orang-orang Timur Asing, terutama orang-orang Tionghoa, sama dengan orang-orang Belanda. Mereka datang ke Indonesia untuk kepentingan ekonomi. Kehidupan orang-orang pribumi pun demikian juga, kehidupannya semata-mata adalah kehidupan pelayan di negerinya sendiri. Tiga golongan masyarakat ini merupakan masyarakat kasta yang masing-masing mempertahankan atau memelihara

cara berfikir, berperasaan, dan bertindak golongannya, hasilnya adalah tidak adanya kehendak bersama sebagai suatu masyarakat yang utuh atau organis.

Demikianlah gambaran masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda sebagaimana digambarkan oleh Furnivall. Keadaannya pada masa kini sudah tentu berbeda dari pada masa tersebut. Namun demikian, mengikuti beberapa modifikasi atas pengertian masyarakat majemuk yang dicetuskan setelah generasi Furnivall, konsep masyarakat majemuk tetap dapat digunakan untuk menganalisis struktur sosial masyarakat Indonesia. Dengan mengabaikan perwujudannya yang kongkrit di masa kini, esensi dari konsepsi Furnivall tentang masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat dalam mana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan, bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu terhadap yang lain.

Tegasnya, suatu masyarakat disebut majemuk apabila masyarakat tersebut secara struktural memiliki subkebudayaan-subkebudayaan yang bersifat *diverse*. Masyarakat yang demikian ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai atau konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat, oleh berkembangnya sistem nilai dari kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya dengan penganutan para anggotanya masing-masing secara tegar dalam bentuknya yang relatif murni, serta oleh sering tumbuhnya konflik-konflik sosial, atau setidaknya oleh kurangnya integrasi dan saling ketergantungan di antara kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya. Sehubungan dengan keadaan yang demikian, Clifford Geertz menjelaskan bahwa masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam subsistem-subsistem yang masing-masing terikat ke dalam ikatan-ikatan yang bersifat primordial.

Dengan cara yang lebih singkat, Pierre L. van den Berghe menyebutkan beberapa karakteristik masyarakat majemuk, sebagai berikut.

1. terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain,
2. memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer,
3. kurang mampu mengembangkan konsensus di antara para anggota-anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar,
4. secara relatif sering kali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain,
5. secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi, serta
6. adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain

Pluralitas Indonesia sesudah Masa Revolusi

Konsep pluralitas/kemajemukan yang dibuat oleh Furnivall sangat tepat digunakan untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda, di mana terdapat tiga golongan yang saling berbeda, yaitu orang-orang kulit putih, keturunan Tionghoa, dan pribumi. Lalu, bagaimana apabila digunakan setelah masa revolusi 1945? Sejak Indonesia mencapai kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, golongan Eropa yang sebelumnya menempati kedudukan penting, terlempar keluar dari sistem sosial masyarakat Indonesia. Maka sejak saat itu, pluralitas yang ada adalah pluralitas internal yang terdapat di antara golongan-golongan pribumi, dan memperoleh artinya yang lebih penting daripada apa yang dikemukakan oleh Furnivall.

Konfigurasi Etnis Masyarakat Majemuk

Dalam makalah yang disampaikan pada seminar Pluralitas, Kesenjangan Sosial, dan Integrasi Nasional di Surabaya tanggal 23 Juli 1990, Dr. Nasikun menyatakan bahwa berdasarkan konfigurasinya, masyarakat majemuk dapat dibedakan ke dalam empat kategori, yaitu: (1) masyarakat majemuk dengan

kompetisi seimbang, (2) masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan, (3) masyarakat majemuk dengan minoritas dominan, dan (4) masyarakat majemuk dengan fragmentasi.

Kategori *pertama* merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah kelompok etnik yang kurang lebih seimbang, sehingga untuk mencapai integrasi sosial atau pemerintahan yang stabil diperlukan koalisi lintas-etnis. Kategori *kedua* dan *ketiga* merupakan varian-varian masyarakat majemuk yang memiliki konfigurasi etnik yang tidak seimbang, di mana salah satu kelompok etnik tertentu (kelompok mayoritas pada kategori kedua dan kelompok minoritas pada kategori ketiga) memiliki *competitive advantage* yang strategis di hadapan kelompok-kelompok yang lain. Masyarakat majemuk dengan kategori *keempat* (dengan fragmentasi) meliputi masyarakat-masyarakat yang terdiri atas sejumlah besar kelompok etnik, semuanya dengan jumlah anggota yang kecil dan tidak satupun memiliki posisi politik yang dominan dalam masyarakat. Kehidupan politik dalam masyarakat dengan konfigurasi demikian sangatlah labil, karena ketidakmampuan membangun *coalition building* yang diperlukan untuk mengakomodasi konflik-konflik yang pada umumnya bersifat anarkhis sebagai akibat dari kecurigaan etnik dan hadirnya pemerintahan yang otoriterian.

b. Sebab-sebab pluralitas (Mengapa Majemuk?)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pluralitas masyarakat Indonesia yang demikian itu terjadi. **Yang pertama**, keadaan geografik wilayah Indonesia yang terdiri atas kurang lebih tiga ribu pulau yang terserak di sepanjang equator kurang lebih tiga ribu mil dari timur ke barat, dan seribu mil dari utara selatan, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya pluralitas sukubangsa di Indonesia. Ketika nenek moyang bangsa Indonesia yang sekarang ini mula-mula sekali datang secara bergelombang sebagai emigran dari daerah yang kita kenal sebagai daerah Tiongkok Selatan pada kira-kira dua ribu tahun sebelum masehi, keadaan geografik serupa itu telah memaksa mereka harus tinggal menetap di daerah yang terpisah-pisah satu sama lainnya. Isolasi geografik demikian

di kemudian hari mengakibatkan penduduk yang menempati setiap pulau atau sebagian dari pulau di Nusantara ini tumbuh menjadi kesatuan-kesatuan sukubangsa yang sedikit banyak terisolasi dari kesatuan-kesatuan sukubangsa yang lain. Setiap kesatuan sukubangsa terdiri atas sejumlah orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan emosional, serta memandang diri mereka sebagai suatu jenis tersendiri. Dengan perkecualian yang sangat kecil, satuan-satuan sosial itu mengembangkan dan akhirnya memiliki bahasa dan warisan kebudayaan yang sama. Lebih dari itu, mereka biasanya mengembangkan kepercayaan bahwa mereka memiliki asal-usul keturunan yang sama, suatu kepercayaan yang seringkali didukung oleh mitos-mitos yang hidup dalam masyarakat.

Tentang berapa jumlah sukubangsa yang sebenarnya ada di Indonesia, ternyata terdapat berbagai pendapat yang tidak sama di antara para ahli ilmu kemasyarakatan. Hildred Geertz misalnya menyebutkan adanya lebih kurang tiga ratus sukubangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda. Skinner menyebutkan adanya lebih dari 35 sukubangsa di Indonesia, masing-masing dengan adat istiadat yang tidak sama. Lebih dari sekedar menyebutkan banyaknya sukubangsa di Indonesia, Skinner menggambarkan juga perbandingan besarnya sukubangsa-sukubangsa tersebut. Beberapa sukubangsa yang paling besar sebagaimana disebut oleh Skinner adalah Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, dan Bugis. Kemudian ada beberapa sukubangsa yang lain yang cukup besar, yaitu Bali, Batak Toba, dan Sumbawa.

Buku Statistik Hindia Belanda menggambarkan prosentasi sukubangsa di Indonesia pada tahun 1930, sebagai berikut.

1. Jawa: 47,02 persen
2. Sunda: 14,53 persen
3. Madura: 7,28 persen
4. Minangkabau: 3,36 persen
5. Bugis: 2,59 persen
6. Batak: 2,04 persen

7. Bali: 1,88 persen
8. Betawi: 1,66 persen
9. Melayu: 1,61 persen
10. Banjar: 1,52 persen
11. Aceh: 1,41 persen
12. Palembang: 1,30 persen
13. Sasak: 1,12 persen
14. Dayak: 1,10 persen
15. Makasar: 1,09 persen
16. Toraja: 0,94 persen
17. lainnya : 9,54 persen.

Walaupun angka tersebut dibuat pada waktu yang telah sangat lampau, tetapi melihat angka kelahiran, angka kematian, atau angka pertumbuhan penduduk, mungkin hal tersebut masih dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi saat ini. Mengikuti pengertian sukubangsa yang dikemukakan oleh para ahli antropologi, Dr. Nasikun menggolongkan orang-orang Tionghoa sebagai salah satu sukubangsa di Indonesia, dan berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik, dan berdasarkan perkiraan tambahan penduduk golongan Tionghoa 3 persen, serta dengan mengingat kurang lebih 100.000 orang Tionghoa kembali ke Tiongkok selama tahun 1959 dan 1960, diperkirakan jumlah orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia pada tahun 1961 sebanyak 2,45 juta orang, sementara penduduk pribumi waktu itu diperkirakan 90.882 juta orang. Walaupun jumlah orang Tionghoa sangat kecil dibandingkan dengan penduduk pribumi, tetapi mengingat kedudukan mereka yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, mereka sangat mempengaruhi hubungan mereka dengan sukubangsa-sukubangsa yang lain (yang secara keseluruhan disebut pribumi).

Faktor kedua yang menyebabkan pluralitas masyarakat Indonesia adalah kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik. Keadaan ini menjadikan Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan, sehingga sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia.

Telah sejak lama masyarakat Indonesia memperoleh berbagai pengaruh kebudayaan bangsa lain melalui para pedagang asing. Pengaruh yang pertama kali menyentuh masyarakat Indonesia adalah agama Hindu dan Budha dari India sejak kurang lebih empat ratus tahun sebelum masehi. Hinduisme dan Budhaisme pada waktu itu tersebar meliputi daerah yang cukup luas di Indonesia, serta lebur bersama-sama dengan kebudayaan asli yang telah hidup dan berkembang lebih dulu. Namun, pengaruh Hindu dan Budaha terutama dirasakan di Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pengaruh kebudayaan Islam mulai memasuki masyarakat Indonesia sejak abad ke-13, akan tetapi baru benar-benar mengalami proses penyebaran yang luas pada abad ke-15. Pengaruh Islam sangat kuat terutama pada daerah-daerah di mana Hindu dan Budha tidak tertanam cukup kuat. Karena keadaan yang demikian, cara beragama yang sinkretik sangat terasakan, kepercayaan-kepercayaan animisme, dinamisme bercampur dengan kepercayaan agama Hindu, Budha, dan Islam. Pengaruh reformasi agama Islam yang memasuki Indonesia pada permulaan abad ke-17 dan terutama akhir abad ke-19 ternyata tidak berhasil mengubah keadaan tersebut, kecuali memperkuat pengaruh agama Islam di daerah-daerah yang sebelumnya memang telah merupakan daerah pengaruh agama Islam. Sementara itu, Bali masih tetap merupakan daerah agama Hindu. Pengaruh kebudayaan Barat mulai memasuki masyarakat Indonesia melalui kedatangan Bangsa Portugis pada permulaan abad ke-16. Kedatangan mereka ke Indonesia tertarik oleh kekayaan rempah-rempah di daerah Kepulauan Maluku, suatu jenis barang dagangan yang sedang laku keras di Eropa pada waktu itu.

Kegiatan misionaris yang menyertai kegiatan perdagangan mereka, dengan segera berhasil menanamkan pengaruh agama Katholik di daerah tersebut. Ketika bangsa Belanda berhasil mendesak bangsa Portugis ke luar dari daerah-daerah tersebut pada kira-kira tahun 1600-an, maka pengaruh agama Katholik pun segera digantikan pula oleh pengaruh agama Kristen Protestan. Namun demikian, sikap bangsa Belanda yang lebih lunak di dalam soal agama apabila dibandingkan dengan bangsa Portugis, telah mengakibatkan pengaruh agama Kristen Protestan hanya

mampu memasuki daerah-daerah yang sebelumnya tidak cukup kuat dipengaruhi oleh agama Islam dan Hindu.

Hasil final dari semua pengaruh kebudayaan tersebut kita jumpai dalam bentuk pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. Di luar Jawa, hasilnya kita lihat pada timbulnya golongan Islam modernis terutama di daerah-daerah yang strategis di dalam jalur perdagangan internasional pada waktu masuknya reformasi agama Islam, golongan Islam konservatif-tradisional di daerah pedalaman-pedalaman, dan golongan Kristen (Katholik dan Protestan) di daerah-daerah Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Tapanuli, dan sedikit di daerah Kalimantan Tengah; serta golongan Hindu Bali (Hindu Dharma) terutama di Bali.

Di Pulau Jawa dijumpai golongan Islam modernis terutama di daerah-daerah pantai Utara Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan kebudayaan pantainya, serta sebagian besar daerah Jawa Barat, golongan Islam konservatif-tradisional di daerah-daerah pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta golongan Kristen yang tersebar di hampir setiap daerah perkotaan Jawa.

Faktor ketiga, iklim yang berbeda-beda dan struktur yang tidak sama di antara berbagai daerah di kepulauan Nusantara, telah mengakibatkan pluralitas regional. Perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah merupakan kondisi yang menciptakan dua macam lingkungan ekologis yang berbeda, yakni daerah pertanian basah (*wet rice cultivation*) yang terutama banyak dijumpai di Pulau Jawa dan Bali, serta daerah ladang (*shifting cultivation*) yang banyak dijumpai di luar Jawa.

RANGKUMAN

Istilah plural atau majemuk sebenarnya berbeda dengan pengertian heterogen. Majemuk atau plural itu merupakan lawan dari kata singular atau tunggal. Sehingga, masyarakat plural itu bukan masyarakat yang tunggal. Masyarakat tunggal merupakan masyarakat yang mendukung satu sistem kebudayaan yang sama, sedangkan pada masyarakat plural, di dalamnya terdapat lebih dari satu kelompok baik etnik maupun sosial yang menganut sistem kebudayaan (subkultur) berbeda satu

dengan yang lain. Sebuah masyarakat kota, mungkin tepat disebut sebagai masyarakat heterogen, sepanjang meskipun mereka berasal dari latar belakang SARA (sukubangsa, agama, ras, atau pun aliran/golongan-golongan) yang berbeda, tetapi mereka tidak mengelompok berdasarkan SARA tersebut. Heterogen lawan dari kondisi yang disebut homogen. Disebut homogen kalau anggota masyarakat berasal dari SARA yang secara relatif sama. Disebut heterogen kalau berasal dari SARA yang saling berbeda, namun –sekali lagi– mereka tidak mengelompok (tersegmentasi) berdasarkan SARA tersebut.

EVALUASI

1. Jelaskan konsep masyarakat majemuk menurut Furnivall dan Geertz
2. Jelaskan faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia
3. Jelaskan berbagai fakta-fakta tentang kemajemukan masyarakat Indonesia

4. Kegiatan Belajar 4

a. Learning Outcome:

(1) Standar Kompetensi

- Menjelaskan pengaruh kemajemukan terhadap struktur kepartaian masyarakat Indonesia

(2) Kompetensi Dasar

- Menjelaskan latar belakang munculnya keberagaman partai
- Menjelaskan faktor historis terjadinya kemajemukan partai
- Menganalisis tentang bentuk-bentuk partai yang ada di Indonesia menurut Herbert Feith

d. Uraian Materi

Struktur Kepartaian Sebagai Wujud Struktur Sosial Masyarakat Indonesia

Apabila perbedaan sukubangsa dan regional secara sederhana membedakan antara Jawa dan Luar Jawa, perbedaan agama membedakan golongan Islam Santri, Islam Non-Santri, dan Kristen, perbedaan lapisan sosial membedakan golongan priyayi dan wong cilik yang secara simplitis oleh Edward Shills disederhanakan lagi menjadi kota dan desa, maka konfigurasi semua itu menghasilkan penggolongan masyarakat ke dalam dua belas golongan, sebagai berikut.

Golongan	Islam Santri		Islam Non Santri		Kristen	
	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
Jawa	1	2	3	4	5	6
Non-Jawa	7	8	9	10	11	12

Pengelompokan masyarakat Indonesia serupa itu membawa akibat yang luas lagi mendalam di dalam seluruh pola hubungan-hubungan sosial di dalam masyarakat, di bidang politik, ekonomi, hukum, kekeluargaan, dan sebagainya. Timbulnya kematangan kondisi-kondisi teknis, politis, dan sosial sejak permulaan abad ke-20, dan terutama sesudah kemerdekaan, telah berhasil mengubah kelompok-kelompok semu tersebut menjadi berbagai kelompok kepentingan. Salah satu kelompok kepentingan yang sangat khusus sifatnya adalah yang kemudian kita kenal sebagai partai politik.

Pada awal pertumbuhannya di Indonesia, kelompok-kelompok kepentingan semacam itu mula-mula lebih memusatkan perhatiannya pada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosio-kultural daripada yang bersifat politis. Baru di kemudian hari kelompok-kelompok kepentingan tersebut mengubah sifatnya menjadi organisasi yang benar-benar bersifat politis.

Beberapa partai politik, seperti Masyumi yang menurut hasil Pemilu 1955 merupakan partai paling besar sesudah PNI, atau Partai Nahdatul Ulama yang merupakan partai paling besar nomor tiga, kiranya dapat memberikan gambaran tentang struktur kepartaian yang berbasis pada kelompok-kelompok yang ada pada masyarakat.

Pada tahun 1943, beberapa organisasi keagamaan termasuk Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama bergabung ke dalam suatu organisasi massa dengan nama "Masyumi" (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Pada permulaan revolusi, organisasi massa tersebut mengubah dirinya menjadi suatu partai politik yang berdiri di atas landasan organisasi-organisasi keagamaan dengan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama sebagai dua di antara anggota-anggotanya yang paling besar. Persaingan lama antara Muhammadiyah dan NU, yang bersumber pada perbedaan latar belakang sosio-kultural di antara pendukung Muhammadiyah dan NU pun segera terlihat di dalam tubuh Masyumi. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Muhammadiyah adalah pendukung gerakan modernisme Islam yang seringkali dihubungkan dengan ajaran-ajaran Muhammad Abduh dari Universitas Al-Azhar di Cairo pada abad ke-19.

Sekalipun organisasi Muhammadiyah berpusat di Jawa, tetapi basis pendukungnya terutama berasal dari Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan daerah-daerah sepanjang pantai Utara Jawa Tengah dan Jawa Timur yang cenderung bersifat kosmopolitan, kekotaan, dan suka berdagang.

Kebanyakan warga NU –termasuk para pemimpinnya– merupakan orang-orang yang menolak gerakan modernisme Islam. Kelahirannya sebagai organisasi keagamaan pada tahun 1926 sendiri merupakan reaksi atas munculnya gerakan modernisasi Islam yang dilancarkan oleh Muhammadiyah. Anggota-anggota NU berasal dari daerah-daerah perdesaan Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan kepercayaan yang banyak dipengaruhi oleh kepercayaan yang berasal dari agama Hindu dan kepercayaan Kejawen yang telah hidup jauh sejak sebelum masuknya agama Hindu di Pulau Jawa.

Konflik dan ketegangan-ketegangan di antara NU dengan Muhammadiyah pada tubuh Masyumi diakhiri dengan keluarnya NU dari Masyumi, dan pada tanggal 30 Agustus 1952, bersama dengan PSII dan PERTI, NU mendirikan Liga Muslimin Indonesia, dan 30 Agustus 1952 itu sendiri dikenal sebagai tanggal berdirinya NU sebagai sebuah partai politik. Sebuah partai lain yang pernah menempati posisi sangat penting di dalam kehidupan politik Indonesia pada masa-masa silam adalah PNI (Partai Nasional Indonesia). Pada Pemilu 1955 merupakan partai paling besar. Sejak awal kelahirannya (1927), PNI banyak memperoleh dukungan dari golongan elit birokrasi, yang kebanyakan adalah elite golongan Jawa yang berpendidikan.

Dukungan yang kemudian menjadi sangat kuat dari lapisan bawah masyarakat Jawa terjadi ketika PNI merumuskan isue tentang Marhaenisme sebagai ideologi partai dan faktor bung Karno sebagai tokoh (Bapak Marhaenisme). Pendukung PNI kebanyakan berasal dari golongan Islam Nominal yang sangat hormat kepada pimpinan birokrasi, dan karena cenderung menganut kepercayaan animisme dan dinamisme menyebabkan golongan ini tidak menyukai partai-partai Islam.

Partai lain yang tidak kalah pentingnya adalah PKI (Partai Komunis Indonesia). Pada Pemilu 1955 partai ini merupakan terbesar ke-empat. Seperti PNI,

pendukung PKI terutama dari kalangan Islam Non-Santri di daerah-daerah Jawa Tengah dan Timur. Lebih dari PNI, pendukung (basis massa) PKI terutama di lapisan bawah masyarakat desa, karenanya di antara partai-partai politik yang ada, PKI-lah yang lebih memiliki banyak pemimpin dari lapisan bawah. Popularitas PKI di kalangan bawah, terutama di perdesaan Jawa, setara dengan PNU. Sebuah partai yang lebih kecil dari yang sudah disebut di depan adalah PSI (Partai Sosialis Indonesia). Partai ini lebih didukung oleh golongan eliter berpendidikan, seperti halnya PNI, tetapi PSI kurang populer di kalangan masyarakat bawah atau perdesaan.

Sementara itu ada dua partai yang didukung oleh orang-orang dari kotak 11 dan 12 pada diagram di atas, adalah PARKINDO (Partai Kristen Indonesia) dan Partai Katholik Indonesia. Pengaruh kedua partai ini meliputi daerah-daerah yang penduduknya menganut agama Katholik dan agama Protestan, seperti Maluku, Sulawesi Utara, Tapanuli, NTT, dan sedikit di daerah pedalaman Kalimantan, serta di daerah-daerah perkotaan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Melihat struktur politik seperti diuraikan di atas, dapat dimengerti bahwa konflik-konflik di antara partai-partai politik di masa silam itu lebih merupakan konflik di antara kelompok-kelompok atau golongan-golongan sosial-kultural berdasarkan perbedaan sukubangsa, agama, daerah, dan stratifikasi sosial, walau sebenarnya tidak sesederhana ini. Konflik-konflik partai politik jauh lebih kompleks dari sekedar bersumber pada perbedaan-perbedaan di atas.

Gambaran yang diberikan oleh Herberth Feith berikut barangkali lebih dapat menjelaskan. Feith menjelaskan bahwa konflik-konflik politik di Indonesia lebih merupakan konflik ideologis yang bersumber dari ketegangan-ketegangan yang terjadi antara (1) pandangan-pandangan (ideologi) tradisional (tradisi Hindu-Jawa dan Islam) di satu pihak, dan (2) pandangan-pandangan (ideologi) modern di lain pihak, yang perwujudannya adalah konflik ideologis di antara lima aliran pemikiran politik yang ada, yaitu:

1. Nasionalisme Radikal
2. Tradisionalisme Jawa

3. Islam
4. Sosialisme Demokrat, dan
5. Komunisme

dan aliran-aliran tersebut dalam batas-batas tertentu berasosiasi dengan perbedaan-perbedaan sukubangsa, agama, daerah, dan kelas sosial. Pola kepartaian sebagaimana digambarkan di atas tentu saja telah mengalami perubahan-perubahan. Dibubarkannya Masyumi, PSI, dan PKI, serta terjadinya fusi partai-partai Islam menjadi faktor penting perubahan-perubahan itu. Namun, dasar-dasar pemikiran politik yang bersumber pada perbedaan-perbedaan sukubangsa, agama, daerah, dan kelas sosial, juga aliran-aliran politik, masih tetap terbaca pada struktur kepartaian dewasa ini.

Warna dasar kehidupan politik Indonesia yang menurut Geertz lebih merupakan representasi dari tiga varian dalam masyarakat, yaitu (1) Santri, (2) Priyayi, dan (3) Abangan, masih tetap relevan pada masa sekarang ini. Reformasi politik di masa presiden Soeharto (1973) di mana partai-partai politik yang ada ketika itu disederhanakan menjadi hanya tiga partai saja (Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI)), seolah-olah justru mengukuhkan kehidupan politik aliran, di mana Golkar identik dengan golongan priyayi, PPP identik dengan golongan santri, dan PDI identik dengan kaum abangan.

RANGKUMAN

Pengelompokan masyarakat Indonesia serupa itu membawa akibat yang luas lagi mendalam di dalam seluruh pola hubungan-hubungan sosial di dalam masyarakat, di bidang politik, ekonomi, hukum, kekeluargaan, dan sebagainya. Timbulnya kematangan kondisi-kondisi teknis, politis, dan sosial sejak permulaan abad ke-20, dan terutama sesudah kemerdekaan, telah berhasil mengubah kelompok-kelompok semu tersebut menjadi berbagai kelompok kepentingan. Salah satu kelompok kepentingan yang sangat khusus sifatnya adalah yang kemudian kita kenal sebagai partai politik.

EVALUASI

1. Jelaskan latar belakang munculnya keberagaman partai
2. Jelaskan faktor historis terjadinya kemajemukan partai
3. Menganalisis tentang bentuk-bentuk partai yang ada di Indonesia menurut Herber Feith

5. Kegiatan Belajar 5

1. Learning Outcome:

(1) Standar Kompetensi

- Menjelaskan struktur masyarakat Indonesia dan masalah integrasi

(3) Kompetensi Dasar

- Menjelaskan konsep integrasi nasional
- Menjelaskan perbedaan antara konsensus dan paksaan untuk integrasi nasional
- Menganalisis tentang bentuk-bentuk struktur sosial dan integrasi

c. Uraian Materi

Struktur Masyarakat Indonesia dan Masalah Integrasi Nasional

Pluralitas masyarakat yang bersifat multidimensional itu akan dan telah menimbulkan persoalan-persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi secara horisontal maupun vertikal pada tingkat nasional. Apabila mengikuti pandangan para penganut teori fungsionalisme-struktural, sistem sosial senantiasa terintegrasi di atas landasan dua hal, yaitu: (1) konsensus di antara sebagian besar anggota masyarakat akan nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental, dan (2) anggota-anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (*cross-cutting affiliation*), sehingga tumbuh *cross-cutting loyalties*, loyalitas yang silang-menyilang dari para anggota masyarakat terhadap kelompok-kelompok atau satuan-satuan sosial di mana mereka menjadi anggotanya. Ketika hal ini diterapkan di suatu masyarakat majemuk akan berhadapan dengan rendahnya kemampuan elemen-elemen dalam masyarakat majemuk membangun konsensus tentang nilai-nilai dasar sebagaimana dikemukakan oleh van den Berghe. Segmentasi ke dalam bentuk satuan-satuan sosial yang masing-masing terikat oleh

ikatan-ikatan yang sifatnya primordial, mudah sekali menimbulkan konflik-konflik yang terjadi baik pada tingkat ideologis maupun politis.

Pada tingkat ideologis, konflik tersebut terwujud di dalam bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut oleh (serta menjadi ideologi) satuan-satuan sosial. Pada tingkat politik, konflik-konflik di antara elemen-elemen dalam masyarakat majemuk terjadi dalam bentuk pertentangan dalam pembagian kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi. Dalam situasi konflik, sadar atau tidak setiap pihak yang berselisih akan berusaha mengabadikan diri dengan cara memperkokoh solidaritas ke dalam di antara sesama anggotanya dengan cara memperkokoh solidaritas ke dalam, membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk keperluan kesejahteraan dan pertahanan bersama: mendirikan sekolah-sekolah untuk memperkuat identitas kultural, bersaing di dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Mengikuti pandangan Parsons, kelangsungan hidup masyarakat Indonesia tidak saja menuntut tumbuhnya nilai-nilai umum tertentu yang disepakati bersama oleh sebagian besar orang-orang Indonesia, akan tetapi lebih dari itu, nilai-nilai umum tersebut harus pula dihayati benar melalui proses sosialisasi dan internalisasi. Pada derajat tertentu, pengakuan bertumpah darah satu, berkebangsaan satu, dan berbahasa satu, yang tumbuh sebagai hasil gerakan nasionalisme pada permulaan abad ke-20 yang berjiwa anti-kolonialisme itu, merupakan konsensus nasional yang memiliki daya tiada terkira di dalam mengintegrasikan masyarakat Indonesia sampai pada saat ini.

Pandangan para penganut pendekatan konflik, bahwa masyarakat majemuk dapat terintegrasi di atas paksaan (*coercion*) dari suatu kelompok-kelompok atau kesatuan sosial yang dominan, memperoleh kebenaran paling tidak pada masyarakat Indonesia di zaman kolonial, di mana terdapat sejumlah kecil orang-orang kulit putih dengan kekuasaan politik, militer, dan ekonominya yang mampu menguasai sejumlah besar orang yang terpisah-pisah secara etnis, ekonomi, politik, ideologis, maupun budaya ke dalam satuan-satuan sosial yang banyak sekali jumlahnya.

Konsensus atau paksaan?

Mengikuti pemikiran R. William Lidle, konsensus nasional merupakan prasyarat bagi tumbuhnya integrasi nasional, karena integrasi nasional yang tangguh hanya dapat berkembang apabila, (1) sebagian besar anggota masyarakat sepakat tentang batas-batas **teritorial** kehidupan politik dalam mana mereka menjadi warganya, dan (2) sebagian besar warga masyarakat sepakat tentang struktur pemerintahan dan aturan-aturan dari proses-proses politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat di wilayah teritorial tersebut.

Dengan kata lain, integrasi nasional hanya dapat tumbuh di atas konsensus mengenai batas-batas suatu masyarakat politik dan sistem politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat tersebut; yang pertama: kesadaran sebagai warga sebuah bangsa dan yang kedua konsensus mengenai bagaimana suatu kehidupan bangsa diselenggarakan, termasuk sistem nilai yang mendasari hubungan-hubungan sosial di antara para anggota suatu bangsa.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah atau ideologi negara dalam tataran yang sangat umum dapat dinyatakan sebagai kesepakatan nasional tentang nilai-nilai yang bersifat dasar. Kemudian, perundang-undangan yang lahir dari sistem politik yang ada, dapat dikatakan sebagai kesepakatan mengenai bagaimana kehidupan bangsa ini diselenggarakan.

Walaupun demikian, seperti berulang disampaikan, pembahasan tentang bagaimana masyarakat majemuk terintegrasi dalam tingkat nasional tidak dapat dilihat dari sudut pandang teori struktural fungsional. Sifat majemuk masyarakat Indonesia memang telah menjadi sebab dan kondisi bagi timbulnya konflik-konflik sosial yang sedikit banyak bersifat *vicious circle*, dan yang oleh karenanya mendorong tumbuhnya proses integrasi sosial di atas landasan *coercion*.

Bentuk struktur sosial dan integrasi nasional

Sesudah revolusi kemerdekaan, konflik di antara golongan-golongan di dalam masyarakat Indonesia berubah menjadi tidak bersifat eksklusif lagi. Perbedaan sukubangsa, yang pada masa penjajahan lebih merupakan perbedaan ras, tidak lagi

jatuh berhimpitan dengan perbedaan-perbedaan agama, daerah, dan pelapisan sosial. Perbedaan antara sukubangsa Jawa dan luar Jawa tidaklah dengan sendirinya merupakan perbedaan antara golongan Islam Santri, golongan Abangan, dan golongan Kristen. Mereka yang berasal dari sukubangsa-sukubangsa berbeda-beda dapat bersama-sama menjadi anggota dari suatu golongan agama yang sama, demikian juga sebaliknya. Struktur demikian, menurut Peter M. Blau disebut struktur sosial yang mengalami interseksi (*intersection social structure*), yang fungsinya positif atau mendukung terciptanya integrasi sosial. Berbeda dengan struktur sosial yang berhimpitan yang disebut *consolidated social structure* (struktur sosial terkonsolidasi) yang menghambat terciptanya integrasi sosial.

Secara sosiologis, terdapat dua pendekatan untuk menjawab persoalan integrasi sosial/nasional dalam masyarakat majemuk, yaitu (1) ada tidaknya konsensus yang lebih menekankan pada dimensi budaya (teori struktural fungsional), dan (2) ada-tidaknya ketergantungan di antara kelompok-kelompok yang ada, atau ada-tidaknya kelompok dominan. Pandangan yang kedua ini lebih menekankan dimensi struktural (teori struktural konflik).

Menurut pendekatan konsensus (teori struktural fungsional) integrasi dapat dicapai melalui suatu kesepakatan tentang nilai dasar, atau semacam *common platform* di antara kelompok-kelompok atau satuan-satuan sosial yang ada; sedangkan menurut pendekatan konflik, integrasi hanya dapat dicapai melalui dominasi satu kelompok atas lainnya, atau adanya saling ketergantungan di antara kelompok-kelompok yang ada.

Terciptanya integrasi sosial/nasional dalam masyarakat majemuk dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: (1) struktur sosialnya, apakah mengalami interseksi atau konsolidasi, (2) faham atau ideologi, yang berkembang dalam masyarakat apakah ethnosentrisme, primordialisme, aliran, sektarianisme, dan lain-lain, ataukah faham relativisme kebudayaan, (3) apakah dapat berlangsung koalisi lintas-etnis/kelompok, (4) apakah dapat membangun konsensus tentang nilai dasar, (5) apakah berlangsung proses-proses menuju akulturasi budaya majemuk, (6) adakah

dalam masyarakat tersebut kelompok dominan, atau (7) apakah di antara kelompok-kelompok yang ada terdapat saling ketergantungan, terutama di bidang ekonomi.

Struktur sosial yang bersifat *intersected*, berkembangnya faham relativisme kebudayaan, koalisi lintas-etnis, konsensus tentang nilai dasar, akulturasi budaya majemuk, dan adanya kelompok dominan merupakan faktor-faktor yang mendorong berlangsungnya integrasi sosial dalam masyarakat majemuk.

RANGKUMAN

Terciptanya integrasi sosial/nasional dalam masyarakat majemuk dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: (1) struktur sosialnya, apakah mengalami interseksi atau konsolidasi, (2) faham atau ideologi, yang berkembang dalam masyarakat apakah ethnosentrisme, primordialisme, aliran, sektarianisme, dan lain-lain, ataukah faham relativisme kebudayaan, (3) apakah dapat berlangsung koalisi lintas-etnis/kelompok, (4) apakah dapat membangun konsensus tentang nilai dasar, (5) apakah berlangsung proses-proses menuju akulturasi budaya majemuk, (6) adakah dalam masyarakat tersebut kelompok dominan, atau (7) apakah di antara kelompok-kelompok yang ada terdapat saling ketergantungan, terutama di bidang ekonomi.

EVALUASI

1. Jelaskan konsep integrasi nasional
2. Jelaskan perbedaan antara konsensus dan paksaan untuk integrasi nasional
3. Analisis tentang bentuk-bentuk struktur sosial dan integrasi nasional

6. Kegiatan Belajar 6

1. Learning Outcome:

(1) Standar Kompetensi

- Menjelaskan stratifikasi dan diferensiasi masyarakat Indonesia

(2) Kompetensi Dasar

- Menjelaskan stratifikasi sosial masyarakat Indonesia
- Menjelaskan diferensiasi sosial masyarakat Indonesia
- Menganalisis bentuk-bentuk stratifikasi dan diferensiasi sosial masyarakat Indonesia

(3) Uraian Materi

Diferensiasi Sosial dan Stratifikasi Sosial dalam Kehidupan Masyarakat

A. Diferensiasi Sosial

Diferensiasi sosial merupakan pemilahan atau konfigurasi struktur sosial berdasarkan parameter-parameter yang sifatnya nominal atau tidak berjenjang. Hasilnya dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok atau golongan sosial.

1. Diferensiasi sosial berdasarkan ras.

Ras merupakan penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik-biologis manusia dengan kecenderungan yang besar.

Ciri fisik:

Fenotipe (tampak luar):

- 1) Kualitatif: warna kulit, warna dan bentuk rambut, warna dan bentuk mata
- 2) Kuantitatif: tinggi dan berat badan, ukuran kepala, ukuran hidung, dll.

Genotype (tidak tampak luar): golongan darah

Manusia dari seluruh dunia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ras utama, yaitu kaukasoid, mongoloid, dan negroid. Dalam prakteknya terdapat kesulitan penggolongan ras, antara lain karena: (1) ciri fisik yang tumpang tindih, dan (2) terjadinya perkawinan campuran (amalgamasi).

2. Diferensiasi sosial berdasarkan sukubangsa/etnis

Sukubangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, yang sering dikuatkan dengan kesatuan bahasa. Sukubangsa sering disamakan dengan kelompok etnik (*ethnic group*). Namun, kelompok etnik tidak selalu berarti sukubangsa. Misalnya kelompok etnik Tionghoa. Disebut kelompok etnik apabila secara sosial telah mengembangkan subkultur-nya sendiri. Lima cirri pengelompokan sukubangsa:

- Bahasa/dialek yang memelihara keakraban dan kebersamaan di antara warga sukubangsa
- Pola-pola sosial-kebudayaan (adat istiadat, cita-cita dan ideologi)
- Ikatan sebagai satu kelompok
- Kecenderungan menggolongkan diri ke dalam kelompok asli
- Perasaan keterikatan kelompok karena kekerabatan/genealogis dan kesadaran teritorial di antara warga sukubangsa

Untuk kepentingan administrasi dan politik, di masa orde baru dibedakan antara

- (1) masyarakat sukubangsa,
- (2) masyarakat terasing, dan
- (3) keturunan asing.

Masyarakat sukubangsa adalah kelompok etnis yang asalnya dari dalam wilayah Indonesia, dan mampu berinteraksi dan komunikasi dengan dunia luarnya, masyarakat terasing adalah kelompok etnis yang asalnya dari dalam wilayah Indonesia, tetapi terisolasi atau mengalami keterbatasan hubungan dengan dunia luarnya, sedangkan keturunan asing memiliki daerah asal di luar wilayah Indonesia. Ada tiga keturunan asing yang menonjol, yaitu China, India dan Arab,

3. Diferensiasi sosial berdasarkan agama

Agama merupakan sistem terpadu terdiri atas keyakinan dan praktek, berhubungan dengan sesuatu yang dianggap *sacred* (suci/sakral) menyatukan pengikutnya ke dalam suatu komunitas moral yang disebut umat. Sesuatu yang sakral disebut Tuhan (God, Allah, Elia, Devon, Deva, Devi, dst.) Diferensiasi agama

merupakan diferensiasi *customs*. Karena letak Indonesia di posisi silang, dalam masyarakatnya terdapat penganut dari lima agama besar dunia, Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha.

4. Diferensiasi sosial berdasarkan profesi

Profesi merupakan pekerjaan yang untuk dapat melaksanakannya memerlukan keahlian. Misalnya: dosen, guru, dokter, jurnalis, artis, penyiar radio, penyiar televisi, ahli komputer, designer, politikus, perawat, birokrat, militer, pengusaha, pedagang, dan sebagainya. Diferensiasi profesi merupakan diferensiasi fungsi.

5. Diferensiasi sosial berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin merupakan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan ciri fisik biologis yang tidak dapat dipertukarkan. Gender merupakan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan ciri-ciri sosial dan budaya yang sebenarnya dapat dipertukarkan, karena diperoleh melalui proses belajar. Misalnya perempuan bekerja di dalam rumah, dan laki-laki bekerja di luar rumah. Maka, jenis kelamin (seks) merupakan perbedaan berdasarkan konstruksi biologis, sedangkan gender berdasarkan konstruksi sosial dan budaya, yang sering dikuatkan oleh ajaran agama.

C. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial merupakan konfigurasi atau pemilahan struktur sosial menggunakan parameter *graduated/berjenjang*. Hasilnya adalah dalam masyarakat terdapat kelas-kelas sosial. Kriteria yang digunakan dapat berupa kriteria (1) sosial, (2) ekonomi, dan (3) politik. Kriteria sosial meliputi: pendidikan, profesi atau pekerjaan, dan keturunan atau keanggotaan dalam kasta dan kebangsawanan. Kriteria ekonomi meliputi pendapatan/penghasilan dan kepemilikan/kekayaan. Kriteria politik meliputi kekuasaan.

Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial

Menurut Weber, para anggota masyarakat dapat dipilah secara vertikal berdasarkan atas ukuran-ukuran kehormatan, sehingga ada orang-orang yang dihormati dan disegani dan orang-orang yang dianggap biasa-biasa saja, atau orang

kebanyakan, atau bahkan orang-orang yang dianggap hina. Orang-orang yang dihormati atau disegani pada umumnya adalah mereka yang memiliki jabatan atau profesi tertentu, keturunan bangsawan atau orang-orang terhormat, atau berpendidikan tinggi. Ukuran-ukuran penempatan anggota masyarakat dalam stratifikasi sosial yang dapat dikategorikan sebagai kriteria sosial antara lain, (1) profesi, (2) pekerjaan, (3) tingkat pendidikan, (4) keturunan, dan (5) kasta.

1. Profesi

Yang dimaksud profesi adalah pekerjaan-pekerjaan yang untuk dapat melaksanakannya memerlukan keahlian, misalnya dokter, guru, wartawan, seniman, pengacara, jaksa, hakim, dan sebagainya. Orang-orang yang menyandang profesi-profesi tersebut disebut kelas profesional. Di samping kelas profesional, dalam masyarakat terdapat juga kelas-kelas tenaga terampil dan tidak terampil, yang pada umumnya ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam stratifikasi sosial masyarakat.

2. Pekerjaan.

Berdasarkan tingkat prestise atau gengsinya, pekerjaan-pekerjaan dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi: (1) pekerjaan kerah putih (*white collar*), dan (2) pekerjaan kerah biru (*blue collar*). Pekerjaan kerah putih merupakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih menuntut penggunaan pikiran atau daya intelektual, sedangkan pekerjaan-pekerjaan kerah biru lebih menuntut penggunaan energi atau kekuatan fisik. Pada umumnya anggota masyarakat lebih memberikan penghargaan atau gengsi yang lebih tinggi pada pekerjaan-pekerjaan kerah putih. Walaupun, tidak selalu bahwa pekerjaan kerah putih memberikan dampak ekonomi atau finansial yang lebih besar daripada pekerjaan kerah biru.

3. Pendidikan

Pada zaman sekarang ini pendidikan sudah dianggap sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebagian besar anggota masyarakat. Orang-orang yang berpendidikan tinggi akan menempati posisi dalam stratifikasi sosial yang lebih

tinggi. Sehingga tamatan S-3 dipandang lebih tinggi kedudukannya daripada tamatan S2, S1, SMA/SMK, SMP, SD, dan mereka yang tidak pernah sekolah.

4. Keturunan

Keturunan raja atau bangsawan dalam masyarakat dipandang memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan, pada masyarakat feodal, hampir tidak ada pengakuan terhadap simbol-simbol yang berasal dari luar istana, termasuk tata kota, arsitektur, pemilihan hari-hari penting, pakaian, seni, dan sebagainya. Penempatan orang dalam posisi-posisi penting dalam suatu struktur sosial masyarakat akan selalu mempertimbangkan faktor keturunan, dan keaslian keturunan dipandang sangat penting.

5. Kasta

Kasta merupakan pemilahan anggota masyarakat yang dikenal pada masyarakat Hinduisme. Masyarakat dipilah menjadi kasta-kasta, seperti: Brahmana, Ksatria, Weisyia, dan Sudra. Kemudian ada orang-orang yang karena tindakannya dihukum dikeluarkan dari kasta, digolongkan menjadi paria. Sebagian besar orang menganggap pemilahan dalam kasta bersifat graduated atau berjenjang, mengingat orang-orang yang berasal dari kasta yang berbeda akan memiliki gengsi (*prestige*) dan hak-hak istimewa (*privilege*) yang berbeda. Namun, tokoh-tokoh Hinduisme menyatakan bahwa kasta bukanlah pemilahan vertikal, melainkan hanyalah merupakan catur warna.

Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi

Kriteria ekonomi yang digunakan sebagai dasar stratifikasi sosial dapat meliputi penghasilan dan pemilikan atau kekayaan. Apabila dipilah menggunakan kriteria ekonomi, maka masyarakat akan terdiri atas

- Kelas atas, yaitu orang-orang yang karena penghasilan atau kekayaannya dengan leluasa dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya
- Kelas menengah, yaitu orang-orang yang karena penghasilan dan kekayaannya dapat leluasa memenuhi kebutuhan hidup mendasarnya, tetapi tidak leluasa untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya

- Kelas bawah, yaitu orang-orang yang dengan sumberdaya ekonominya hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup mendasarinya, tetapi tidak leluasa, atau bahkan tidak mampu untuk itu.

Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik

Ukuran yang digunakan untuk memilah masyarakat atas dasar dimensi atau kriteria politik adalah distribusi kekuasaan. Kekuasaan (power) berbeda dengan kewenangan (otoritas). Seseorang yang berkuasa tidak selalu memiliki kewenangan. Yang dimaksud kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain dalam masyarakat, termasuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif. Sedangkan wewenang adalah hak untuk berkuasa. Apa yang terjadi apabila orang mempunyai wewenang tetapi tidak memiliki kekuasaan? Mana yang lebih efektif, orang mempunyai kekuasaan saja, atau wewenang saja?

Meskipun seseorang memiliki hak untuk berkuasa, artinya ia memiliki wewenang, tetapi kalau dalam dirinya tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, maka ia tidak akan dapat melaksanakan hak itu dengan baik. Sebaliknya, apabila seseorang memiliki kemampuan mempengaruhi pihak lain, meskipun ia tidak punya wewenang untuk itu, pengaruh itu dapat berjalan secara efektif. Untuk lebih memahami hal ini, dapat diperhatikan pengaruh tokoh masyarakat, seperti seorang tokoh agama atau orang yang dituakan dalam masyarakat.

Sudah berabad-abad menjadi pemikiran dalam dalil politik, bahwa kekuasaan dalam masyarakat selalu terdistribusikan tidak merata. Gaetano Mosca (1939) menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat selalu terdapat dua kelas penduduk: satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama yang jumlahnya lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua, yang jumlahnya lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama itu.

Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, dan Robert Michels memberikan pengertian bahwa beberapa asas umum yang menjadi dasar bagi terbentuknya stratifikasi sosial, khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan politik, adalah:

1. Kekuasaan politik tidak dapat didistribusikan secara merata
2. Orang-orang dikategorikan ke dalam dua kelompok: yang memegang kekuasaan dan yang tidak memilikinya
3. Secara internal, elite itu bersifat homogen, bersatu, dan memiliki kesadaran kelompok
4. Keanggotaan dalam elite berasal dari lapisan yang sangat terbatas
5. Kelompok elite pada hakikatnya bersifat otonom, kebal akan gugatan dari siapa pun di luar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya

Di dalam masyarakat yang demokratis, pembagian dikotomis antara yang berkuasa dan tidak berkuasa tidak sesederhana yang dikemukakan Mosca dan kawan-kawannya. Walaupun kelas berkuasa jumlah orangnya selalu lebih sedikit, tetapi pada umumnya distribusi kekuasaan lebih terfragmentasi ke berbagai kelompok-kelompok. Dalam masyarakat yang demokratis, kelompok elite tidak memiliki otonomi sebagaimana pada masyarakat diktator. Kekuasaan elite dalam masyarakat demokratis selalu dapat dikontrol oleh kelompok-kelompok yang ada di luar kelompok elite, dan jumlahnya lebih dari satu.

A. Dampak diferensiasi terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia

1. Kemajemukan Sosial: pengelompokan masyarakat secara horisontal yang didasarkan pada adanya perbedaan Ras, Etnis (suku bangsa), klen, agama dan sebagainya. Kemajemukan masyarakat Indonesia terbentuk karena beberapa hal seperti: (a) Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beberapa ribu pulau besar kecil dari barat sampai ke timur yang kemudian tumbuh menjadi satu kesatuan sukubangsa yang melahirkan berbagai ragam budaya. (b) Indonesia terletak antara dua titik silang samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak strategis ini merupakan daya tarik bagi bangsa-bangsa asing datang dan singgah di wilayah ini sehingga Amalgamasi (perkawinan campur) dan Asimilasi

(perbauran budaya) diantara kaum pendatang dan penduduk asli maupun antara kaum pendatang sendiri terjadi. Hal demikian membuat masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras, etnis dan sebagainya. (c) Iklim yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lain menimbulkan perbedaan mata pencaharian penduduknya. Contoh: orang yang tinggal di wilayah pedalaman cenderung bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan yang tinggal di wilayah-wilayah pantai sebagai seorang nelayan/pelaut. Dapat ditarik kesimpulan dengan adanya diferensiasi sosial mempengaruhi terbentuknya anekaragam budaya, misalnya: bahasa, dialek, kesenian, arsitektur, alat-alat budaya, dan sebagainya.

b. Heterogenitas

Ada dua macam Heterogenitas, yakni: (1) Heterogenitas masyarakat berdasarkan profesi/pekerjaan. Masyarakat Indonesia yang besar ini penduduknya terdiri dari berbagai profesi seperti pegawai negeri, tentara, pedagang, pegawai swasta, dsbnya. Setiap pekerjaan memerlukan tuntutan profesionalisme agar dapat dikatakan berhasil. Untuk itu diperlukan penguasaan ilmu dan melatih ketrampilan yang berkaitan dengan setiap pekerjaan. Setiap pekerjaan juga memiliki fungsi di masyarakat karena merupakan bagian dari struktur masyarakat itu sendiri. Hubungan antar profesi atau orang yang memiliki profesi yang berbeda hendaknya merupakan hubungan horisontal dan hubungan saling menghargai biarpun berbeda fungsi, tugas, bahkan berbeda penghasilan. (2) Heterogenitas atas dasar jenis kelamin. Di Indonesia biarpun secara konstitusional tidak terdapat diskriminasi sosial atas dasar jenis kelamin, namun pandangan “gender” masih dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Pandangan gender ini dikarenakan faktor kebudayaan dan agama. Apabila kita melihat kemajuan Indonesia sekarang ini, banyak perempuan yang berhasil menguasai Iptek dan memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat. Maka sudah selayaknya perbedaan jenis kelamin dikategorikan secara horisontal, yaitu hubungan kesejajaran yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Dari kedua macam Heterogenitas tersebut dapat ditarik kesimpulan: melalui Heterogenitas memunculkan adanya profesionalisme-profesionalisme dalam

pekerjaan, keterampilan-keterampilan khusus (skill), spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, kesadaran HAM, dan sebagainya.

B.Dampak Stratifikasi sosial terhadap masyarakat Indonesia

(1). Selain menimbulkan tumbuhnya pelapisan dalam masyarakat, juga munculnya kelas-kelas sosial atau golongan sosial. (2). Adanya pelapisan sosial dapat pula mengakibatkan atau mempengaruhi tindakan-tindakan warga masyarakat dalam interaksi sosialnya. Pola tindakan individu-individu masyarakat sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan status dan peran sosial akan muncul dengan sendirinya. (3). Pelapisan masyarakat mempengaruhi munculnya *life chesser & life style* tertentu dalam masyarakat, yaitu kemudahan hidup dan gaya hidup tersendiri. Misalnya, orang kaya (lapisan atas) akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, jika dibandingkan orang miskin (lapisan bawah); dan orang kaya akan punya gaya hidup tertentu yang berbeda dengan orang miskin.

RANGKUMAN

Diferensiasi sosial merupakan pemilahan atau konfigurasi struktur sosial berdasarkan parameter-parameter yang sifatnya nominal atau tidak berjenjang. Hasilnya dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok atau golongan sosial. Stratifikasi sosial merupakan konfigurasi atau pemilahan struktur sosial menggunakan parameter graduated/ berjenjang. Hasilnya adalah dalam masyarakat terdapat kelas-kelas sosial. Kriteria yang digunakan dapat berupa kriteria (1) sosial, (2) ekonomi, dan (3) politik. Kriteria sosial meliputi: pendidikan, profesi atau pekerjaan, dan keturunan atau keanggotaan dalam kasta dan kebangsawanan. Kriteria ekonomi meliputi pendapatan/penghasilan dan pemilikan/kekayaan. Kriteria politik meliputi kekuasaan

EVALUASI

1. Jelaskan bagaimana bentuk diferensiasi sosial dalam masyarakat Indonesia
2. Jelaskan bagaimana bentuk stratifikasi sosial dalam masyarakat Indonesia
3. Jelaskan bagaimana pengaruh diferensiasi dan stratifikasi sosial terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia.

7. Kegiatan Belajar 7

a. Learning Outcome:

(2) Standar Kompetensi

Menjelaskan Masyarakat desa dan masyarakat kota di Indonesia

(3) Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan masyarakat desa di Indonesia
2. Menjelaskan masyarakat kota di Indonesia
3. Menjelaskan keterkaitan antara masyarakat desa dan kota di Indonesia

b. Uraian Materi

MASYARAKAT DESA DAN KOTA DI INDONESIA

Pada mulanya masyarakat kota sebelumnya adalah masyarakat pedesaan, dan pada akhirnya masyarakat pedesaan tersebut terbawa sifat-sifat masyarakat perkotaan, dan berupaya untuk melupakan kebiasaan sebagai masyarakat pedesaannya. Perbedaan masyarakat pedesaan dan masyarakat kota adalah bagaimana cara mereka mengambil sikap dan kebiasaan dalam memecahkan suatu permasalahan. Berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan lebih mengutamakan kenyamanan bersama dibanding kenyamanan pribadi atau individu. Masyarakat perkotaan sering disebut sebagai sebuah *urbancommunity*. Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat kota yaitu: (1). kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa. Masyarakat kota hanya melakukan kegiatan keagamaan hanya bertempat di rumah peribadatan seperti di masjid, gereja, dan lainnya. (2) orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain (3). di kota-kota kehidupan keluarga sering sukar untuk disatukan, karena perbedaan politik dan agama dan sebagainya. (4). jalan pikiran rasional yang dianut oleh masyarakat perkotaan. (5). interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor-faktor kepentingan pribadi daripada faktor-faktor kepentingan umum.

Hal tersebutlah yang membedakan antara karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan, oleh karena itu, banyak orang-orang dari perkotaan yang pindah ke pedesaan untuk mencari ketenangan, sedangkan sebaliknya, masyarakat pedesaan pergi dari desa untuk ke kota mencari kehidupan dan pekerjaan yang layak untuk kesejahteraan mereka. Karakteristik umum masyarakat pedesaan yaitu masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri dalam hidup bermasyarakat, yang biasa nampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat dicontohkan pada kehidupan masyarakat desa di Jawa. Namun dengan adanya perubahan sosial dan kebudayaan serta teknologi dan informasi, sebagian karakteristik tersebut sudah tidak berlaku. Berikut ini ciri-ciri karakteristik masyarakat desa, yang terkait dengan etika dan budaya mereka yang bersifat umum.

1. Sederhana
2. Mudah curiga
3. Menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku didaerahnya
4. Mempunyai sifat kekeluargaan
5. Lugas atau berbicara apa adanya
6. Tertutup dalam hal keuangan mereka
7. Perasaan tidak ada percaya diri terhadap masyarakat kota
8. Menghargai orang lain
9. Demokratis dan religius
10. Jika berjanji, akan selalu diingat

Sedangkan cara beradaptasi mereka sangat sederhana, dengan menjunjung tinggi sikap kekeluargaan dan gotong royong antara sesama, serta yang paling menarik adalah sikap sopan santun yang kerap digunakan masyarakat pedesaan.

Hubungan Desa dan Kota

Salah satu bentuk hubungan antara kota dan desa adalah :

- a). Urbanisasi dan Urbanisme

Dengan adanya hubungan Masyarakat Desa dan Kota yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan tersebut maka timbulah masalah baru yakni; Urbanisasi yaitu suatu proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota atau dapat pula dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. (Soekanto, 1969:123).

b) Sebab-sebab Urbanisasi

- 1) Faktor-faktor yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan daerah kediamannya (*push factors*)
- 2) Faktor-faktor yang ada di kota yang menarik penduduk desa untuk pindah dan menetap di kota (*pull factors*)

Hal-hal yang termasuk *push factor* antara lain:

- a. Bertambahnya penduduk sehingga tidak seimbang dengan persediaan lahan pertanian,
- b. Terdesaknya kerajinan rumah di desa oleh produk industri modern.
- c. Penduduk desa, terutama kaum muda, merasa tertekan oleh adat istiadat yang ketat sehingga mengakibatkan suatu cara hidup yang monoton.
- d. Didesa tidak banyak kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan.
- e. Kegagalan panen yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti banjir, serangan hama, kemarau panjang, dan sebagainya. Sehingga memaksa penduduk desa untuk mencari sebuah aktivitas pemenuhan kebutuhan penghidupan lain di kota melalui urbanisasi.

Interaksi Sosial di daerah Perkotaan

Hal-hal yang termasuk *pull factor* antara lain:

- a. Penduduk desa kebanyakan beranggapan bahwa di kota banyak pekerjaan dan lebih mudah untuk mendapatkan penghasilan
- b. Di kota lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan usaha kerajinan rumah menjadi industri kerajinan.
- c. Pendidikan terutama pendidikan lanjutan, lebih banyak dikota dan lebih mudah didapat.

- d. Kota dianggap mempunyai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi dan merupakan tempat pergaulan dengan segala macam kultur manusianya.
- e. Kota memberi kesempatan untuk menghindarkan diri dari kontrol sosial yang ketat atau untuk mengangkat diri dari posisi sosial yang rendah (Soekanto, 1969: 124-125).

Interaksi Sosial di daerah Pedesaan

Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat yang hakekatnya, bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dimanapun ia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai masyarakat yang saling mencintai saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat. Masyarakat Desa atau juga bisa disebut sebagai masyarakat tradisional manakala dilihat dari aspek budayanya. Masyarakat pedesaan itu lebih bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Masyarakat desa adalah kebersamaan. Sedangkan pola interaksi masyarakat kota adalah individual, sebagai contoh kalau anda pergi ke suatu desa, dan anda bertanya dengan seseorang siapa nama tetangganya, pasti dia hafal. Kalau di kota, kurang dapat bersosialisasi karena masing-masing sudah sibuk dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Pola interaksi masyarakat pedesaan adalah dengan prinsip kerukunan, sedang masyarakat perkotaan lebih ke motif ekonomi, politik, pendidikan, dan kadang hierarki. Pola solidaritas sosial masyarakat pedesaan timbul karena adanya kesamaan-kesamaan kemasyarakatan, sedangkan masyarakat kota terbentuk karena adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Pada dasarnya masyarakat desa dan kota adalah sama-sama bersinergi untuk membangun sebuah negara, Bagaimanapun karakternya, Dimanapun tempatnya, adalah tetap satu yaitu masyarakat.

RANGKUMAN

Masyarakat pedesaan adalah sekelompok orang yang jumlahnya kurang dari 2.500 jiwa yang tinggal di suatu wilayah hukum, yang juga merupakan suatu organisasi pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan diberi kewenangan mengatur urusan rumah tangganya masing-masing. Masyarakat perkotaan adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah yang cukup besar, padat, permanen, dihuni oleh masyarakat yang heterogen, dan cenderung melakukan interaksi hanya atas dasar kepentingan bukan karena pribadi.

Evaluasi

Dengan ujian tulis esay:

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara masyarakat desa dan kota
2. Jelas bagaimana keterkaitan masyarakat desa dan kota di Indonesia
3. Jelaskan bagaimana mengatasi ketimpangan hubungan desa dan kota tersebut

8. Kegiatan Belajar 8

1. Learning Outcome:

2. Standar Kompetensi

Menjelaskan isu-isu esensial dalam masyarakat Indonesia
(kemiskinan)

3. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan konsep kemiskinan

2. Menjelaskan faktor penyebab kemiskinan dalam masyarakat
Indonesia

3. Menjelaskan dampak kemiskinan dalam masyarakat Indonesia

4. Menjelaskan upaya-upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia

(4) Uraian Materi

MASALAH KEMISKINAN DI INDONESIA

1. Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau bisa dikatakan dengan suatu kondisi serba kekurangan dalam arti minimnya materi yang dimana mereka ini tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Dari indikator ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Sementara ini yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk menarik garis kemiskinan adalah pendekatan ilmu ekonomi yang melihat kemiskinan melalui sistem pengeluaran. Seperti ditulis Dr. Humam Hamid tentang Pemanasan Global dan Kemiskinan Lokal (Serambi, 23/05/2009), yang membahas dua katagori kemiskinan, yaitu: kemiskinan ini terkait dengan ketidakadilan seperti upah yang tak sebanding dengan dengan apa yang telah dikerjakan serta sering terjadinya eksploitasi, penreusakan lingkungan sehingga membuat banyak orang modal alam untuk memenuhi

kehidupannya, termasuk pemungutan yang sangat memberatkan dan memeras rakyat. Kemiskinan “sementara” kemiskinan ini terjadi karena faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial sikap malas, kurang trampil dan kurangnya kemampuan dalam segala hal, juga termasuk lemah fisik, dan lain-lain). Kemiskinan “kronis”.

2. Faktor-Faktor yang dianggap sebagai penyebab terjadinya Kemiskinan

Kondisi kemiskinan kian hari menjadi sangat fenomenal di Indonesia, karena kemiskinan ini sangatlah berpengaruh besar dalam pertumbuhan serta perkembangan negara. Kemiskinan tidak hanya terjadi di negara sedang berkembang, namun kemiskinan juga dapat terjadi di negara yang maju. Beberapa faktor penyebab terjadinya masalah kemiskinan adalah: yaitu disebabkan oleh orang itu sendiri seperti kemalasan, kebodohan, dan lain-lain (1). faktor individual, faktor struktural ini begitu besar mengambil peran (2). Faktor Struktural, dalam penciptaan kemiskinan, karena meliputi semua orang yang ada di dalamnya. Faktor ini berada di luar diri individu sehingga dalam banyak hal tidak bisa dikendalikan oleh individu tersebut, tetapi sangat mempengaruhi individu tersebut. Selain itu juga terdapat beberapa penyebab utama dari timbulnya kemiskinan Penyebab utama dari timbulnya kemiskinan ini adalah: (1).terbatasnya kecukupan dan mutu pangan (2).terbatasnya akses serta rendahnya mutu layanan kesehatan, pendidikan, dan sempitnya lapangan pekerjaan (3). kurangnya pengawasan serta perlindungan terhadap asset usaha (4). kurangnya penyesuaian terhadap gaji upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan seseorang (5). memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam (6). besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga (7). tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. Kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh Negara-negara berkembang melainkan negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa

terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan Buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnyanya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan suatu pertumbuhan ketimbang dari pada sebuah pemerataan.

Masalah kemiskinan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saja apabila kita lihat di pinggir jalan sering terlihat anak-anak kecil meminta-minta, banyak para pengemis dan pengamen. Hal tersebut dilakukan oleh mereka karena suatu keadaan ekonomi yang kurang mencukupi bagi kehidupan mereka. Itu semua memperlihatkan betapa besarnya masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Biasanya beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok-kelompok tertentu. Kaum wanita pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan. Apabila dalam keadaan rumah tangga miskin, maka kaum wanita lah yang menanggung beban kerja yang lebih berat dari pada kaum pria. Demikian pula dengan anak-anak mereka juga menjadi korban akibat adanya ketidakmerataan dan kualitas hidup masa depan mereka terancam oleh karena tidak tercukupnyanya gizi, pemerataan. Kesehatan, serta pendidikan.

Di samping itu juga, masalah kemiskinan juga dipengaruhi oleh para koruptor yang dengan tenang dan bebasnya menggunakan dana yang seharusnya untuk rakyat digunakan untuk kebutuhan pribadi mereka. Sangat disayangkan bila itu terjadi apalagi dilakukan tanpa adanya perasaaan manusiawi dan tanpa rasa berdosa Menurut Kartasasmita (1997: 234) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Sedangkan menurut Brendley (dalam Ala, 1981:4) kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi sebuah kebutuhan sosial yang keteresediannya masih terbatas.

Di Jakarta, terlihat sekali betapa besarnya masalah kemiskinan yang terjadi. Banyak sekali pengamen di lampu merah, rumah kumuh atau rumah liar di lapangan kosong dan di pinggiran kali dan masih banyak lagi. Untuk rumah liar yang ada di Jakarta jumlahnya sangat banyak. Mereka tidak tahu apakah tanah yang mereka gunakan untuk membangun rumah liar tersebut milik mereka atau tidak. Mereka main membangun rumah saja dengan bahan dan bentuk rumah apa adanya dengan tujuan hanya untuk mendapatkan tempat untuk beristirahat dan berteduh saja tanpa mengetahui latar belakang tempat dan wilayah yang mereka huni. Seiring berjalanya waktu, kini pemerintahan Indonesia mulai melakukan banyak kegiatan alternative untuk membantu rakyat miskin, misalkan saja yang kita ketahui bahwa kini pemerintahan telah mengadakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan langsung kepada rakyatnya. Namun program ini dinilai tidak relevan karena pembagiannya tidak merata kesemua rakyat miskin, kini masih juga ditemukan banyak warga miskin yang sama sekali belum menerima program BLT tersebut.

Banyak berbagai macam cara untuk mengatasi kemiskinan yang harus dilakukan, yaitu: (a) Menyediakan lapangan pekerjaan yang layak (b).Menyediakan fasilitas pendidikan yang murah bagi orang yang tidak mampu bahkan jika perlu mengadakan program pembebasan biaya sekolah alias gratis (c). Menanamkan caraberpikir positif dan mau selalu bekerja keras dan pantang menyerah jika mengalami suatu kegagalan. (d). Pemerintah harus memperhatikan keadaan rakyat miskin dan memberikan bantuan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. (e) Kita semua harus selalu berkomitmen dan konsisten untuk melakukan perbaikan lebih baik lagi di sistem ataupun ditindakan. (f) mempertahankan nilai mata uang dll. (g) Kebijakan kemiskinan merupakan Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan. Selain itu ada juga rencana pembangunan jangka pendek yang

diantaranya adalah dengan mengurangi kesenjangan antar daerah dengan menyediakan irigasi, air bersih, dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha untuk meningkatkan investasi dan program untuk menciptakan revitalisasi pada sektor industri.

RANGKUMAN

Masalah Kemiskinan bisa terjadi di Negara maju maupun Negara sedang berkembang. Selain itu kemiskinan juga menjadi masalah dunia sejak berabad-abad lalu. sehingga kini kemiskinan masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini. Seiring berkembangnya pemikiran bahwa kemiskinan adalah masalah struktural, maka upaya untuk mengatasi kemiskinan pun kini dikaitkan dengan perbaikan sistem dan struktur, tidak semata-mata bertumpu pada aksi yang dilakukan dalam program sesaat saja, berupa *crash program*. Namun kini pemerintahan Indonesia sedikit demi sedikit telah memperbaiki keadaan ekonomi rakyat dengan mengatasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Sekarang ini pemerintahan Indonesia telah melakukan program Bantuan Langsung Tunai yang ditujukan bagi masyarakat yang termasuk pada kelas ekonomi menengah ke bawah.

Evaluasi

Dengan tes tulis, model soal essay:

1. Jelaskan konsep kemiskinan
2. Jelaskan penyebab kemiskinan di Indonesia
3. Jelaskan apa saja program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah
4. Jelaskan pengaruh kemiskinan pada struktur sosial masyarakat Indonesia

10. Kegiatan Belajar 10

1. Learning Outcome:

2. Standar Kompetensi

(1). Menjelaskan isu-isu esensial dalam masyarakat Indonesia
(korupsi)

3. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan konsep korupsi

2. Menjelaskan faktor penyebab korupsi dalam masyarakat
Indonesia

3. Menjelaskan dampak korupsi dalam masyarakat Indonesia

4. Menjelaskan upaya-upaya mengatasi korupsi di Indonesia

(5) Uraian Materi

MASALAH KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi adalah suatu perbuatan yang sudah lama dikenal di dunia dan di Indonesia. Syed H. Alatas yang pernah meneliti korupsi sejak Perang Dunia Kedua menyebutkan, esensi korupsi adalah melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Beliau membagi korupsi ke dalam tujuh macam, yaitu korupsi transaksi, memeras, investif, perkerabatan, defensif, otogenik dan dukungan. Indonesia berusaha untuk memberantas korupsi sejak 1950-an dengan mendirikan berbagai lembaga pemberantas korupsi, terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) suatu “superbody” dengan kewenangan istimewa.

Peraturan perundang-undangan merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Tebang pilih, Begitu kira-kira pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus korupsi akhir-akhir ini.

Penyebab Korupsi di Indonesia:

1. Tanggungjawab profesi, moral dan sosial yang rendah;
2. Sanksi yang lemah dan penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum, institusi pemeriksa/ pengawas yang tidak bersih/independen;
3. Rendahnya disiplin/ kepatuhan terhadap Undang-undang dan Peraturan;
4. Kehidupan yang konsumtif, boros dan serakah (untuk memperkaya diri);
5. Lemahnya pengawasan berjenjang (internal) dalam pelaksanaan tugas;
6. Hilangnya rasa malu ber KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
7. Wewenang yang besar tidak diikuti evaluasi laporan kinerja;
8. Kesempatan korupsi yg terbuka;
9. Budaya memberi upeti/tips;
10. Pengaruh lingkungan sosial;
11. Penghasilan yang rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang layak;
12. Lemahnya penghayatan Pancasila dan pengalaman agama.

Sedangkan pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara Masyarakat masih menganggap suap sebagai hal yang wajar, lumrah, dan tidak menyalahi aturan. Suap terjadi hampir di semua aspek kehidupan dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyak yang belum memahami bahwa suap, baik memberi maupun menerima, termasuk tindak korupsi. Suap dianggap sebagai bentuk primitif dan induk korupsi. Suap adalah awal lahirnya budaya koruptif dalam skala luas yang terjadi saat ini. Contoh paling sederhana di masyarakat kita adalah bila seseorang ingin membuat KTP dalam waktu satu hari langsung jadi padahal ketentuannya satu minggu, seseorang yang akan membuat KTP itu memberikan uang tambahan/tips kepada pegawai kecamatan agar KTP itu jadinya satu hari.

Realitas di sekitar kita, program pengaspalan jalan oleh pemerintah berupa pemberian bantuan aspal gratis yang harus diambil oleh RT/ RW ke kantor setempat, tetapi ketika hendak diambil, maka jangan ditanya kalau RT/ RW diminta. Untuk mengisi blanko kuetansi kosong dengan pesan: "kalau tidak bersedia mengisi ya, tidak dapat aspal gratis, kalau sudah diteken silahkan ambil

aspalnya“. Selain itu sering kita mendengar berita di media ketika musim pendaftaran anak sekolah SD, SMP, SMU, yang dicap sekolah favorit malah kita sendiri yang menyediakan *uang ekstra* agar anak kita dapat diterima.

Dari contoh dan realitas di atas suap memakai bahasa lain yang bukan terang-terangan mengatakan ini adalah suap hanya “membantu”. Sebenarnya membantu ini adalah hal yang lumrah tapi disalahgunakan demi kepentingan yang lain dan akhirnya justru disalahgunakan demi keuntungan pribadi dan saling menguntungkan antara pemberi dan penerima.

Upaya Pemberantasan Korupsi:

1. Percepatan pemberlakuan “Asas Pembuktian Terbalik”;
2. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dengan sanksi berat kepada pelaku korupsi (hukuman mati);
3. Meningkatkan komitmen, konsisten dengan sanksi berat kepada pelaku korupsi;
4. Menata kembali organisasi, memperjelas, transparansi, mempertegas tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap instansi;
5. Menyempurnakan sistem ketatalaksanaan meliputi: perumusan kebijakan (agar tidak terjadi penyalahgunaan kebijakan), perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pertanggungjawaban kinerja serta kualitas layanan masyarakat;
6. Memperbaiki manajemen kepegawaian;
7. Mengembangkan budaya kerja/tertib/malu melakukan KKN;
8. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pelayanan prima.

RANGKUMAN

Pernyataan korupsi sebagai sebuah kebudayaan tetap menjadi sebuah pernyataan yang melahirkan dua pandangan yang berbeda. Ada pihak yang mengatakan bahwa tindakan korupsi merupakan sebuah budaya dan ada juga yang menentang hal ini. Namun perbedaan pendapat ini didasarkan pada pemahaman

kebudayaan yang berbeda-beda pula. Korupsi bisa di lihat sebagai sebuah kebudayaan jika kebudayaan memiliki diartikan sebagai sebuah tingkah laku yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, sebuah kebiasaan yang terus terpelihara dalam masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok yang besar seperti seperti bangsa Indonesia. Namun secara filosofis, korupsi di satu pihak bukanlah sebuah kebudayaan sebab korupsi sungguh bertentangan dengan nilai dan unsur kebudayaan itu sendiri dan di pihak lain korupsi dapat dikatakan sebuah kebudayaan jika meneliti motif dari korupsi itu sendiri. Nilai kebahagiaan yang merupakan hal yang mendasar dari manusia itu sendiri merupakan motif di balik tindakan korupsi itu.

EVALUASI

Berbentuk soal esay:

1. Jelaskan konsep korupsi
2. Jelaskan apa saja faktor penyebab korupsi di Indonesia
3. Jelaskan program yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah dan meminimalisir kejahatan korupsi
4. Jelaskan pengaruh sistem sosial terhadap timbulnya korupsi

11. Kegiatan Belajar 11

1. Learning Outcome:

2. Standar Kompetensi

(1). Menjelaskan isu-isu esensial dalam masyarakat Indonesia (primordialisme)

3. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan konsep primordialisme

2. Menjelaskan faktor penyebab primordialisme dalam masyarakat Indonesia

3. Menjelaskan dampak primordialisme dalam masyarakat Indonesia

4. Menjelaskan upaya-upaya mengatasi primordialisme di Indonesia

(6) Uraian Materi

PRIMORDIALISME DALAM STRUKTUR SOSIAL INDONESIA

1. Pendahuluan

Primordialisme di Indonesia Secara tidak sadar masyarakat Indonesia ternyata terus mengembangkan ikatan-ikatan yang bersifat primordial, yaitu loyalitas berlebihan yang mengutamakan atau menonjolkan kepentingan suatu kelompok agama, ras, daerah, atau keluarga tertentu. Padahal loyalitas yang berlebihan terhadap budaya subnasional tersebut dapat mengancam integrasi bangsa karena primordialisme mengurangi loyalitas warga negara pada budaya nasional dan Negara sehingga mengancam kedaulatan negara. Kecenderungan ini timbul apabila setiap kelompok kultural yang terorganisasi secara politik akan mengembangkan politik aliran yang dapat mengancam persatuan bangsa. Selanjutnya, kelompokkelompok masyarakat tersebut akan mengajukan tuntutan untuk

memperjuangkan kepentingan kelompoknya seperti tuntutan pembagian sumber daya alam yang lebih seimbang antara pusat dan daerah. Apabila tidak diakomodasi, tuntutan kelompok masyarakat tersebut akan berkembang menjadi gerakan memisahkan diri suatu kelompok masyarakat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Misalnya, gerakan separatisme Aceh Merdeka (GAM).

Di dalam masyarakat Indonesia terdapat Kemajemukan atau perbedaan suku bangsa, bahasa, ras, kasta, agama, kedaerahan tradisi budaya, dan adat istiadat. Contoh kemajemukan tersebut tercermin pada adanya komunitas keturunan Tionghoa, India, dan penduduk pribumi di Medan, Sumatera Utara. Perbedaan etnik, suku bangsa, agama, dan budaya tersebut membuat masyarakat Indonesia sulit terintegrasi dalam satu kesatuan sosial. Oleh karena itu, untuk menangkal gejala primordialisme, setiap kelompok masyarakat harus mengembangkan budaya toleransi terhadap budaya kelompok lainnya. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa tanpa pengingkaran budaya sendiri. Keanekaragaman budaya dalam masyarakat terbentuk atas dasar identitas budaya. Identitas budaya adalah kategori pembeda berdasarkan nilai-nilai budaya antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Hal itu terjadi karena tiap identitas cultural memiliki sentimen primordial tertentu yang memengaruhi ikatan politik, persilangan, dan interaksi sosial di antara kelompok etnik di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat, kehidupan politik terorganisir menurut kelompok etnik dan nilai-nilai subbudaya tertentu. Kelompok etnik membentuk organisasi politik yang saling bersaing. Mereka mengikuti dasar kepentingan kelompok etnik atau politik aliran dari kelompok yang bersangkutan. Misalnya, dalam Pemilu 2004 terdapat banyak partai politik yang berlandaskan agama, suku, bangsa, dan aliran, seperti PKS, PBB, PDS, PDIP, dan PAN.

Betapa kompleksnya primordialisme di Negara Indonesia, karena itulah hendaknya setiap masyarakat Indonesia mempunyai sikap toleransi yang tinggi, sehingga antara kelompok dalam satu bangsa Indonesia tidak terpecah belah.

2. Definisi Primordialisme

Primordialisme dalam pengertiannya adalah suatu paham atau ide dari anggota masyarakat yang mempunyai kecenderungan untuk berkelompok sehingga terbentuklah suku-suku bangsa. Pengelompokan itu tidak semata-mata melihat hanya sekedar adanya pembentukan suku bangsa saja, tetapi juga di bidang lain, misalnya pengelompokan berdasarkan adanya idiologi agama dan kepercayaan namun semua itu di dasari adanya niat baik bukan dalam arti yang kini “telah terjebak” adanya niat tidak baik dari “Oknum” demi kepentingan “politik, ekonomi, atau kekuasaan sehingga merusak tatanan kehidupan pruralisme sebagaimana terjadi di Indonesia. Sedangkan paham Primordialisme menurut para ahli sosiologi cenderung digunakannya untuk menggambarkan adanya ikatan-ikatan seseorang dalam kehidupan sosial (yang masih murni) dengan hal-hal yang di bawah sejak awal kelahiran seperti suku bangsa, daerah kelahiran, ikatan, dan agama. Jadi, paham Primordialisme itu secara singkat dapat diartikan juga sebagai paham yang orisinil atau ide orisinil dari anggota masyarakat yang memiliki “kecenderungan” untuk berkelompok berdasarkan suku-suku bangsa tentu dengan nilai-nilai yang baik tidak dalam arti “digembosi oknum”.

Dalam konteks ke Indonesiaan, salah satu konsekuensi dari kenyataan yang tengah terjadi yaitu adanya kemajemukan masyarakat atau diferensiasi sosial adalah terjadinya primordialisme oleh banyak “oknum” penguasa, antara lain yaitu pandangan “oknum” atau paham “oknum” yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal (menurut pribadi oknum) yang sejak semula melekat pada diri individu, seperti suku bangsa, ras, dan agama - kemudian diterjemahkan ke dalam “aturan yang berlaku umum” tanpa memandang kemajemukan.

Primordialisme murni sesungguhnya sebagai identitas murni sebuah golongan atau kelompok sosial, merupakan faktor penting dalam memperkuat ikatan golongan atau kelompok yang bersangkutan dalam menghadapi realitas sosial di sekitarnya agar dapat berbaur dengan baik dan saling menghargai tidak dalam rangka

untuk dilihat adanya “ancaman dari luar” yang selama ini sering disalahartikan. Namun, seiring dengan itu, primordialisme juga dapat membangkitkan prasangka dan permusuhan terhadap golongan atau kelompok sosial lain.

3. Faktor Penyebab Primordialisme

Faktor Primordialisme dapat saja terjadi dikarenakan: (a). Adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh oknum individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial; (b). Adanya suatu sikap oknum untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial dari ancaman luar; (c). Adanya nilai-nilai (oleh oknum) yang berkaitan dengan sistem keyakinan, seperti nilai keagamaan dan pandangan hidup: Dan menurut jenisnya antara lain:

Suku: adalah seseorang yang terikat dengan sukunya sendiri daripada suku yang lain. Contoh: Kelompok suku Bugis yang keras, tidak mau mengalah, menganggap kepercayaannya paling sempurna dan mau menang sendiri terhadap suku Dayak.

Agama: adalah seseorang yang mempercayai atau berpegang teguh pada agamanya sendiri dan cenderung fanatik. Contoh: Sekelompok orang dari FPI yang menganggap agamanya paling benar dan unggul dari agama lain dan menyebabkan konflik karena pemikirannya.

Wilayah: adalah seseorang yang terikat dengan daerahnya sendiri ketimbang daerah lainnya. Contoh: pemikiran yang beranggapan kepentingan kelompok suatu daerah tertentu harus mengalahkan kepentingan daerah lain atau lebih mementingkan daerahnya sendiri.

Dalam konteks kebangsaan, sedianya bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai tidak saja pahlawannya tetapi makna Primordialisme kepahlawanan yang telah diteladani, demikianlah maksud dari segala yang kita baca dan kita dengar dalam makna semboyan setiap kali kita memperingati Hari Pahlawan 10 November. Selayaknya kita tidak saja kembali mengenangkan dan menghargai tetapi juga meneladani Primordialisme dari para pahlawan-pahlawan bangsa kita,

karena memang kita ingin dan telah menjadi suatu bangsa yang besar sebagaimana juga diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Maka dalam kenangan dan penghargaan itu terlintasilah kembali tokoh-tokoh Primordialisme pahlawan sejarah nasional kita yang sudah banyak berjasa bagi Tanah Air dan terdapat dua aspek yang berkaitan erat dengan Primordialisme kepahlawanan, yaitu Primordialisme keberanian dan Primordialisme sikap sosial. Aspek yang pertama, Primordialisme keberanian, masih dapat dibedakan menjadi dua, Primordialisme keberanian fisik dan Primordialisme keberanian moral. Jadi, secara sederhana, definisi Primordialisme kepahlawanan adalah Primordialisme keberanian yang bersifat fisik atau moral dalam arti memperjuangkan demi kepentingan umum. Di sini kepentingan umum merupakan syarat pokok dan etika Primordialisme. Sebab, bila berani tapi demi kepentingan pribadi, maka yang demikian itu bukanlah sikap Primordialisme kepahlawanan.

Jadi, jelas sikap Primordialisme kepahlawan ini masih dibutuhkan oleh negara dan bangsa kita. Hanya saja bentuk dan sifatnya tidak monoton melainkan bisa berbeda sesuai dengan situasi yang berkembang. Sikap kemerdekaan di masa revolusi kemerdekaan, ditandai dengan mengangkat senjata, dengan bekal keberanian fisik. Sekarang ini sikap Primordialisme kepahlawanan menuntut bentuk lain yaitu mengisik kemerdekaan dengan keberanian moral yakni Primordialisme keberanian untuk menegakkan apa yang dianggap benar, adil bagi kepentingan umum. Bukannya benar dan adil bagi kepentingan sendiri yang selama ini sering dibalutkan demi “kepenting pribadi dan golongan” dalam selogan “politik sesaat”..

Salah satu ciri sikap Primordialisme kepahlawanan yang masih tetap relevan adalah Primordialisme kesediaan seseorang untuk berkorban demi kepentingan masyarakatnya. Sikap Primordialisme ini mengandaikan sikap Primordialisme pioner atau Primordialisme kepeloporan. Mereka yang mempunyai sikap kepahlawan tadi, tanpa ragu-ragu berjuang menaklukkan hutan belantara yang buas demi mencari daerah pemukiman baru yang diharapkan memberi kehidupan yang lebih baik bagi bangsanya. Dengan demikian, jelas bahwa sikap Primordialisme kepahlawanan

mengharuskan adanya kesediaan seseorang untuk berkorban, mengambil risiko, tapi juga kreativitas demi kebahagiaan masyarakat umum. Oleh karenanya, tidak mengherankan, sering kali yang menikmati hasil jerih payah pahlawan sering bukan dirinya, tetapi orang lain ataupun generasi berikutnya.

Presiden RI sebagai pemuda, menilai bila melihat perkembangan objektif bangsa ini, mau tidak mau sikap Primordialisme kepahlawanan pada diri kita harus semakin dikembangkan, jangan malah sebaliknya. Sebagai generasi yang dibesarkan bukan dalam masa revolusi, semestinya harus bisa menghayati dan menghargai pengorbanan para pahlawan yang telah mengantarkan kemerdekaan bangsa. Sementara itu, dalam diri kita mesti ditumbuhkan semangat rela berkorban. bila tidak, Indonesia sebagai Primordialisme negara kesatuan dengan ikrarnya yang besejarah pada 1928, berbangsa satu, bertanah air satu dan berbahasa satu, bukannya semakin kokoh, mendekati cita-cita idealnya justru akan semakin surut.

Sekalipun kita sudah berikrar sebagai Primordialisme bangsa yang satu, Primordialisme bangsa Indonesia, tapi dalam kenyataannya perasaan sebagai putera daerah atau suku masih lebih kuat berakar. Ikatan primordialisme atau sukuisme masih kuat di maknai dan disalah artikan oleh setiap “tua-tua” bangsa ini. Padahal yang diperjuangkan oleh para Primordialisme pahlawan adalah terwujudnya Primordialisme bangsa Indonesia yang bersifat Primordialisme nasional, kohesif atau kokoh dan modern. Maka diperlukan membangun semangat Primordialisme nasionalisme. Berknaan dengan Primordialisme nasionalisme ini, perlu tiga aspek dasar yang pokok yakni tujuan, bentuk dan asasnya. Pertama, Primordialisme paham nasionalisme bertujuan membentuk manusia Indonesia berpikir, merasa, bersikap, bertindak selaku bangsa Indonesia. Sedangkan Primordialisme bentuknya adalah kegiatan nyata yang menunjang tercapainya tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Serta ketiga, Primordialisme asas, yaitu perlakuan secara manusiawi yang menumbuhkan kesetiakawanan antarmanusia yang menimbulkan rasa senasib sepenanggungan selaku bangsa keseluruhan.

RANGKUMAN

Dalam konteks ke Indonesiaan, salah satu konsekuensi dari kenyataan yang tengah terjadi yaitu adanya kemajemukan masyarakat atau diferensiasi sosial adalah terjadinya primordialisme oleh banyak “oknum” penguasa, antara lain yaitu pandangan “oknum” atau paham “oknum” yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal (menurut pribadi oknum) yang sejak semula melekat pada diri individu, seperti suku bangsa, ras, dan agama-kemudian diterjemahkan ke dalam “aturan yang berlaku umum” tanpa memandang kemajemukan. Primordialisme murni sesungguhnya sebagai identitas murni sebuah golongan atau kelompok sosial, merupakan faktor penting dalam memperkuat ikatan golongan atau kelompok yang bersangkutan dalam menghadapi realitas sosial di sekitarnya agar dapat berbaur dengan baik dan saling menghargai tidak dalam rangka untuk dilihat adanya “ancaman dari luar” yang selama ini sering di salah artikan. Namun, seiring dengan itu, primordialisme juga dapat membangkitkan prasangka dan permusuhan terhadap golongan atau kelompok sosial lain.

EVALUASI

Berbentuk soal esay:

1. Jelaskan konsep primordialisme
2. Jelaskan apa saja faktor penyebab primordialisme di Indonesia
3. Jelaskan program yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah dan meminimalisir primordialisme di Indonesia
4. Jelaskan pengaruh sistem sosial terhadap timbulnya primordialisme di Indonesia

12. Kegiatan Belajar 12

1. Learning Outcome:
2. Standar Kompetensi
Menjelaskan isu-isu esensial dalam masyarakat Indonesia (masalah kependudukan)
3. Kompetensi Dasar
 1. Menjelaskan konsep masalah kependudukan di Indonesia
 2. Menjelaskan faktor penyebab masalah kependudukan dalam masyarakat Indonesia
 3. Menjelaskan dampak masalah kependudukan dalam masyarakat Indonesia
 4. Menjelaskan upaya-upaya mengatasi masalah kependudukan di Indonesia
 5. Uraian Materi

MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

Permasalahan kependudukan di Indonesia salah satu yang harus dihadapi di setiap negara, bukan tidak mungkin angka kelahiran di setiap tahunnya akan terus meningkat, dan pemerintah pun akan kesulitan untuk mensejahterakan rakyat karena dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dan anggaran untuk membantu masyarakat menengah kebawah juga ikut meningkat kebutuhan pokok semakin lama semakin menipis dan lowongan pekerjaan yang terbatas.

Adapun masalah-masalah kependudukan yang dialami oleh Indonesia antara lain:

A. Demografis

1. Besarnya Jumlah Penduduk (Over Population) Telah disebutkan sebelumnya di awal bahwa jumlah penduduk Indonesia berada di urutan ke empat terbesar di dunia setelah berturut-turut China, India, Amerika Serikat dan keempat adalah Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia dari hasil Sensus 2010 mencapai angka 237.641.326

(www.bps.go.id). Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Dari sensus tahun 1971-2010, jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Dari data yang diambil dari Kabupaten Kepulauan Selayar akan mewakili jumlah penduduk Indonesia, di bawah ini dapat dilihat bagaimana jumlah penduduk di Kepulauan Kepulauan Selayar dari tahun ke tahun semakin bertambah. Hal ini tentunya memberikan berbagai dampak baik positif dan negatif. Sebelum membahas tentang masalah kependudukan, ada baiknya kita mengetahui dampak positifnya lebih dahulu antara lain sebagai penyedia tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam, mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain, dsb.

Akan tetapi permasalahan kependudukan terkait dengan jumlah penduduk yang besar menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan. Indonesia memiliki berbagai potensi terjadinya konflik. Benturan antara berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi masa lainnya membuat masalah besarnya populasi menjadi hambatan. Selain itu yang terpenting terkait dengan permasalahan penyediaan sumber daya alam dan berbagai kebutuhan penting lainnya. Adanya tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan menjadi masalah yang sangat rumit. Kepentingan untuk membangun tempat tinggal dan ruang gerak sangatlah penting namun di sisi lain terdapat kepentingan yang terkait dengan permasalahan lingkungan seperti halnya sebagai daerah aliran sungai, daerah resapan air, pertanian, penyediaan sumber daya alam, dll. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan keduanya perlu mendapatkan perhatian yang sama demi keseimbangan alam.

Selain itu, masalah yang muncul terkait dengan jumlah penduduk yang besar adalah dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Kebutuhan akan bahan pokok menuntut orang untuk bekerja dan mencari nafkah. Namun, penyedia lapangan kerja sangatlah minim. Yang menjadi masalah adalah penduduk lebih senang untuk menggantungkan diri terhadap pekerjaan dan cenderung mencari pekerjaan daripada membuka lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan masalah baru yaitu pengangguran. Apabila jumlah pengangguran ini tinggi, maka rasio ketergantungan tinggi sehingga negara

memiliki tanggungan yang besar untuk penduduknya yang dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi.

Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak namun lahan dan juga wilayah Indonesia tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia.

2. Tingginya Tingkat Pertumbuhan Penduduk Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk. Besarnya laju pertumbuhan penduduk membuat pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat.

Semakin besar persentase kenaikannya maka semakin besar jumlah penduduknya. Kenaikan ini tentunya membawa dampak bagi kependudukan Indonesia. Dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan yang ada di Indonesia. Dari situlah muncul program KB dan kini ditangani oleh BKKBN.

Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan maka akan terjadi berbagai masalah baik masalah pengangguran, tingkat kualitas sumber daya manusia yang menurun, kejahatan, lapangan pekerjaan dll yang memberikan dampak negatif bagi kelangsungan umat manusia Indonesia khususnya. Oleh karena itu, usaha untuk menekan laju pertumbuhan sangatlah penting. Program-program yang ditawarkan pemerintah harus didukung oleh masyarakat seperti halnya KB, penggunaan alat kontrasepsi, penundaan usia perkawinan, dll sehingga penurunan laju pertumbuhan penduduk diharapkan menurun.

3. Persebaran Penduduk Tidak Merata Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per km kuadrat. Berdasarkan sensus penduduk dan survey penduduk, persebaran penduduk Indonesia antar provinsi yang satu dengan provinsi yang lain tidak merata. Di Indonesia sendiri terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Hampir lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia mendiami Jawa. Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, transportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas hanya berada di satu wilayah. Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan. Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk:

1. Kesuburan tanah, daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk, karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya.
2. Iklim, wilayah yang beriklim terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu basah biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal
3. Topografi atau bentuk permukaan tanah pada umumnya masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah datar
4. Sumber air
5. Perhubungan atau transportasi
6. Fasilitas dan juga pusat-pusat ekonomi, pemerintahan, dll.

Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar di dunia. Tingkat pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Sebenarnya jumlah penduduk yang besar bukanlah suatu masalah, sebab apabila semua penduduknya memiliki kualitas SDM yang baik maka justru akan memberikan kontribusi kepada negara. Masalah kependudukan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Masalah Penduduk yang Bersifat Kuantitatif
 - a. Jumlah Penduduk Besar Penduduk dalam suatu negara menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek dan objek pembangunan. Manfaat jumlah penduduk yang besar (1) Penyediaan tenaga kerja dalam masalah

sumber daya alam. (2) Mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain.

Selain manfaat yang diperoleh, ternyata negara Indonesia yang berpenduduk besar, yaitu nomor 4 di dunia menghadapi masalah yang cukup rumit yaitu:

(1) Pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas masalah ini sulit diatasi sehingga berakibat seperti masih banyaknya penduduk kekurangan gizi makanan, timbulnya pemukiman kumuh. (2) Penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan serta fasilitas sosial lainnya. Dengan kemampuan dana yang terbatas masalah ini cukup sulit diatasi, oleh karena itu pemerintah menggalakkan peran serta sektor swasta untuk mengatasi masalah ini.

b. Pertumbuhan/perkembangan jumlah Penduduk sangat cepat

Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961–1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1% pertahun, tahun 1971–1980 sebesar 2,32% pertahun, tahun 1980–1990 sebesar 1,98% pertahun, dan periode 1990–000 sebesar 1,6% pertahun. Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga, demi kesejahteraan keluarga. Dalam program ini setiap keluarga dianjurkan mempunyai dua atau tiga anak saja atau merupakan keluarga kecil. Dengan terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga sejahtera. Dua tujuan pokok Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia yaitu: (a). Menurunkan angka kelahiran agar penambahan penduduk tidak melebihi kemampuan peningkatan produksi. (b). Meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai keluarga sejahtera (c). Persebaran penduduk tidak merata. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata baik persebaran antarpulau, provinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan. Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya $\pm 7\%$ dari seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni lebih kurang

60% penduduk Indonesia Perkembangan kepadatan di Pulau Jawa dan Madura tergolong tinggi, yaitu tahun 1980 sebesar 690 jiwa tiap-tiap kilometer persegi, tahun 1990 menjadi 814 jiwa dan tahun 1998 menjadi 938 jiwa per kilo meter persegi Akibat dari tidak meratanya penduduk, yaitu luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit. Lahan bagi petani sebagian dijadikan permukiman dan industri. Sebaliknya banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Sebagian besar tanah di luar Jawa dibiarkan begitu saja tanpa ada kegiatan pertanian. Keadaan demikian tentunya sangat tidak menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan bagi peningkatan pertahanan keamanan negara. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat migrasi ke pulau Jawa, antara lain karena pulau Jawa:

- Sebagai daerah yang selama ini telah menjadi pusat pemerintahan.
- Sebagian besar tanahnya merupakan tanah vulkanis yang subur.
- Merupakan pusat kegiatan ekonomi dan industri sehingga banyak tersedia lapangan kerja.
- Tersedia berbagai jenjang dan jenis serta berbagai bentuk lembaga pendidikan.
- Memiliki sarana komunikasi yang baik dan lancar. Persebaran penduduk antara kota dan desa juga mengalami ketidakseimbangan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi di Indonesia terus-menerus selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Urbanisasi yang terus terjadi menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk di kota yang luas wilayahnya terbatas. Pemusatan penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan kota-kota besar lainnya akan dapat menimbulkan berbagai dampak buruk terhadap lingkungan hidup, seperti:

- akibat berkembang atau munculnya berbagai kawasan permukiman liar.
- Sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah baik oleh masyarakat atau rumah tangga maupun dari pihak pabrik-pabrik industri.
- Terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan dan industri.
- Timbulnya berbagai masalah sosial seperti perampokan, pelacuran, dan lain-

lain. Oleh karena dampak yang dirasakan cukup besar maka perlu ada upaya untuk meratakan penyebaran penduduk di tiap-tiap daerah.

Upaya yang dilakukan

Upaya-upaya yang telah diprogramkan dan dilakukan tersebut adalah: (a) Pemerataan pembangunan. (b) Penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya dan daerah pedesaan. (c) Pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengelolaan lingkungan alamnya. Selain di Jawa ketimpangan persebaran penduduk terjadi di Irian Jaya dan Kalimantan. Luas wilayah Irian Jaya 21,99% dari keseluruhan luas wilayah negara Indonesia, tetapi jumlah penduduknya hanya 0,92% dari seluruh penduduk Indonesia. Pulau Kalimantan luasnya 28,11% dari luas Indonesia, tetapi jumlah penduduknya hanya 5% dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata dilaksanakan program transmigrasi. Tujuan pelaksanaan transmigrasi yaitu:

- Program pemerataan persebaran penduduk di wilayah Indonesia.
- program dalam rangka peningkatan taraf hidup transmigran.
- Program dalam rangka pengolahan sumber daya alam (SDA).
- Program pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
- Program penyediaan berbagai lapangan kerja bagi para transmigran.
- Program pemerintah untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- Meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia.

Persebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Daerah-daerah yang padat penduduknya terjadi eksploitasi sumber daya alam/ kekayaan alam di Indonesia yang dilakukan secara berlebihan sehingga terganggu keseimbangan alam. Sebagai contoh adalah hutan yang terus menyusut karena ditebang untuk dijadikan lahan pertanian maupun pemukiman. Dampak buruk dari berkurangnya luas hutan adalah:

(1). terjadi banjir karena peresapan air hujan oleh hutan berkurang. (2). Terjadi masalah kekeringan dan (3). tanah sekitar hutan menjadi tandus karena erosi.

2. Masalah Penduduk yang Bersifat Kualitatif

a. Tingkat kesehatan penduduk yang rendah meskipun telah mengalami perbaikan, tetapi kualitas kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Indikator untuk melihat kualitas kesehatan penduduk adalah dengan melihat: (1) Angka Kematian (2) Angka Harapan Hidup Angka kematian yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk maka pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan.

b. Kondisi sosial akibat tingkat pendidikan yang masih rendah, tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi. Kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi (sarjana) tetapi menganggur. Keadaan demikian tentu sangat memprihatinkan. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain (keluarganya). Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk.

c. Masalah kependudukan yang berhubungan dengan tingkat kemakmuran yang rendah, meskipun tidak termasuk negara miskin, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan cukup besar. Sebanyak 37,5 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan menurut standard yang ditetapkan PBB. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Semakin

tinggi kualitas SDM penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Banyak negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Mengapa banyak penduduk Indonesia yang hidup miskin.

RANGKUMAN

Akan tetapi permasalahan kependudukan terkait dengan jumlah penduduk yang besar menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan. Indonesia memiliki berbagai potensi terjadinya konflik. Benturan antara berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi masa lainnya membuat masalah besarnya populasi menjadi hambatan. Selain itu yang terpenting terkait dengan permasalahan penyediaan sumber daya alam dan berbagai kebutuhan penting lainnya. Adanya tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan menjadi masalah yang sangat rumit. Kepentingan untuk membangun tempat tinggal dan ruang gerak sangatlah penting namun di sisi lain terdapat kepentingan yang terkait dengan permasalahan lingkungan seperti halnya sebagai daerah aliran sungai, daerah resapan air, pertanian, penyediaan sumber daya alam, dll. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan keduanya perlu mendapatkan perhatian yang sama demi keseimbangan alam.

EVALUASI

Berbentuk soal esay:

1. Jelaskan konsep masalah kependudukan di Indonesia
2. Jelaskan apa saja faktor penyebab masalah kependudukan di Indonesia
3. Jelaskan program yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah dan meminimalisir masalah kependudukan di Indonesia
4. Jelaskan pengaruh sistem sosial terhadap timbulnya masalah kependudukan di Indonesia

13. Kegiatan Belajar 13

1. Learning Outcome:
2. Standar Kompetensi
Menjelaskan kedudukan wanita dalam struktur sosial masyarakat Indonesia
3. Kompetensi Dasar
 1. Menjelaskan wanita dalam masyarakat Indonesia
 2. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi kedudukan dalam masyarakat Indonesia
 3. Menjelaskan dampak masalah kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia
 4. Menjelaskan upaya-upaya mengatasi masalah kedudukan wanita di Indonesia
 5. Uraian Materi

WANITA DALAM STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA

1. Pendahuluan

Masyarakat dunia pada umumnya masih dibayangi oleh sistem patriarkal, demikian juga di Indonesia. Struktur masyarakat umumnya masih bersifat patriarkal dan lembaga utama dari sistem ini adalah keluarga. sistem patriarkal merupakan struktur yang mengabsahkan bentuk struktur kekuasaan dimana lelaki mendominasi wanita. Dominasi ini terjadi karena posisi ekonomis wanita lebih lemah dari lelaki (Arief Budiman: 1985,60) sehingga wanita dalam pemenuhan kebutuhannya sangat tergantung pada lelaki. Kondisi ini merupakan implikasi dari sistem patriarkal yang memisahkan peran utama antara lelaki dan wanita dalam keluarga, lelaki berperan sebagai kepala keluarga, terutama bertugas di sektor publik sebagai pencari nafkah, memberi peluang bagi lelaki untuk memperoleh uang dari pekerjaannya, sedang wanita sebagai “ratu rumah tangga”, terutama bertugas di sektor domestik

sebagai pendidik anak dan pengatur rumah tangga yang tidak memperoleh bayaran. Untuk pemenuhan kebutuhan materialnya wanita tergantung kepada lelaki sebagai pencari nafkah.

Pembagian peran di sektor publik untuk lelaki dan di sektor domestik untuk wanita ini terutama terlihat jelas di lingkungan keluarga ekonomi menengah ke atas, sedangkan pada keluarga ekonomi rendah/bawah dikotomi pembagian peran kerja berdasarkan sistem patriarkal mengalami perubahan. Kesulitan ekonomi memaksa mereka kaum wanita dari kelas ekonomi rendah untuk ikut berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarganya dengan bekerja di luar sektor domestik. Keterlibatan wanita sekaligus dalam sektor domestik (yang memang dianggap sebagai peran kodrati mereka) dan di sektor publik selanjutnya akan disebut peran ganda.

2. Masalah wanita dalam struktur sosial

Jika dominasi lelaki terhadap wanita karena ditentukan oleh kelemahan posisi ekonomis wanita daripada lelaki, apakah dengan turut sertanya wanita dari golongan ekonomi lemah ini bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga akan berhasil melepaskannya dari dominasi lelaki, sehingga menempatkannya sejajar bagi lelaki atau sebaliknya peran ganda wanita justru menempatkannya pada posisi yang semakin tertekan/tereksploitasi, karena beban tugas yang ditanggungnya semakin berat, sementara lelaki masih tetap pada peran tunggalnya sebagai pencari nafkah, bukanlah hal ini lebih menguntungkan kaum lelaki.

Akhirnya berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan terlihat kecenderungan bahwa dengan peran gandanya wanita dari golongan ekonomi lemah ini justru semakin tertekan/tereksploitasi. Mengapa demikian? permasalahan inilah yang menarik untuk dikaji dalam tulisan ini. Berdasarkan beberapa faktor, maka dalam tulisan ini unit analisisnya ialah bentuk keluarga batih dari golongan ekonomi lemah sedang fokus analisisnya ialah kondisi sosial ekonomi wanita bekerja dari golongan

ini. Sesuai dengan fokus analisisnya maka penulis mempergunakan perspektif Karl Marx untuk membantu menyoroti masalah ini.

1. Keberadaan Pekerja Wanita di Pasar Tenaga Kerja

Keterlibatan wanita dalam pasar tenaga kerja ditinjau dari perspektif Karl Marx erat kaitannya dengan perkembangan sistem kapitalis. Pada dasarnya perkembangan kapitalis sangat tergantung pada akumulasi modal dengan demikian kedudukan buruh dalam sistem ini hanya merupakan komoditi yang dinilai dengan nilai tukar di pasar bebas. Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari proses produksinya maka sistem ini berupaya untuk menekan biaya proses produksi seminimal mungkin, sehingga pada prakteknya upah buruh dibayar murah, tapi buruh harus mencurahkan waktu yang panjang untuk bekerja bagi kepentingan kapitalis. Perspektif Marx menggambarkan dengan cara ini kapitalis memperoleh keuntungan yang besar sehingga bisa menjadi modal untuk mengembangkan usaha. Perkembangan usaha ini selanjutnya memerlukan penambahan jumlah tenaga kerja, karena tenaga kerja yang tersedia sudah tidak memadai lagi, maka kekurangan tenaga kerja diambil dari keluarga buruh, yakni dengan melibatkan anggota keluarga mereka. Marx dan Engels dalam hal ini mengemukakan keluarga kelas proletar. Khususnya ekonomi individu dalam kelas buruh sedemikian memprihatinkan sehingga istri dan anak-anak mereka terpaksa bekerja berjam-jam lamanya dalam pabrik untuk mencukupi pendapatan demi kelangsungan keluarga mereka (Doyle; 1986, 137). Memperhatikan faktor di atas terlihat bahwa keterlibatan wanita dalam pasar tenaga kerja merupakan pengaruh dari:

1. Faktor ekstern yang merupakan faktor penarik untuk bekerja yakni adanya kesempatan kerja yang ditawarkan oleh kapitalis.
2. Faktor intern, yang merupakan faktor pendorong untuk bekerja yakni desakan/kesulitan ekonomi keluarga. Faktor kesempatan kerja dan faktor untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi inilah yang pada hakekatnya menghantarkan kaum wanita untuk bekerja di sektor publik.

2. Kedudukan Pekerja Wanita di dalam Struktur Ketenagakerjaan

Dalam perspektif Marx untuk melihat kedudukan pekerja wanita maka tidak terlepas dari fokus analisisnya terhadap masyarakat kapitalis. Dalam struktur kapitalis kedudukan seseorang ditentukan oleh penguasaan alat produksi, dalam kasus pekerja kelas bawah ini maka kedudukan seseorang ditentukan oleh kemampuannya untuk menghasilkan produksi berdasarkan pekerjaannya. Dalam kapitalisme pembagian kerja dalam perusahaan ditentukan oleh dorongan efisiensi produksi dalam hubungannya untuk memaksimalkan keuntungan (Marx: Anthony Giddens: 1987: 122). Artinya bahwa penempatan posisi seseorang dalam struktur ketenagakerjaan ditentukan oleh tingkat produktifitasnya dan ketrampilannya, selanjutnya akan memperlihatkan variasi upah yang berbeda berdasarkan tingkat produktifitasnya. Akibatnya siapa yang mampu bekerja lebih keras dalam jangka waktu yang panjang akan menghasilkan produksi yang lebih banyak berarti akan memperoleh upah yang lebih besar. Pada gilirannya akan menempatkan posisinya pada kedudukan yang lebih baik dalam struktur ketenagakerjaannya.

Konsekuensinya terhadap pekerja wanita kriteria ini jelas tidak menguntungkan. Wanita dari golongan ekonomi lemah yang secara umum identik dengan kemiskinan dan tingkat pendidikan maupun ketrampilan rendah, maka ketika wanita memutuskan untuk terlibat bekerja di sektor publik maka ia harus mau menerima jenis pekerjaan apa saja yang ditawarkan kapitalis, yang umumnya menempatkan mereka pada pekerjaan yang tidak memerlukan ketrampilan khusus dan umumnya berupah rendah. Sedang kesulitan ekonomi memaksa mereka untuk tetap melaksanakan sendiri tugas-tugas kerumahtanggaannya, untuk menggaji orang lain merupakan hal yang tidak mungkin. Keterikatannya terhadap pekerjaan domestik/rumahtangga menyebabkan waktu yang tercurah untuk bekerja di sector publik sangat terbatas. Kesempatan kerja bagi kaum wanita yang umumnya hanya terbatas pada pekerjaan berupah rendah serta keterbatasan waktu yang bisa dicurahkan untuk bekerja diluar sektor domestik menempatkan mereka pada posisi

yang rendah dalam struktur ketenagakerjaan. Sementara lelaki memperoleh posisi yang lebih baik, karena bisa mencurahkan waktunya secara penuh untuk bekerja di sektor publik, sebab mereka tidak terbebani oleh tugas-tugas di sektor domestik. Dengan demikian mereka dapat berproduksi dan memperoleh upah lebih besar dari wanita. Akhirnya baik di sektor domestik maupun di sektor publik wanita tetap didominasi oleh kaum lelaki, karena pada kenyataan struktur ketenagakerjaan juga menempatkan lelaki pada posisi ekonomis yang lebih kuat dari kaum wanita, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan materialnya wanita masih tergantung pada kaum lelaki.

Marx mengemukakan bahwa situasi yang terjadi dalam hubungan ekonomi akan merembet/mempengaruhi bentuk hubungan pada struktur sosial non- ekonomis. Dengan kata lain sistem struktur hubungan kerja yang diciptakan oleh sistem kapitalis akan mempengaruhi terciptanya struktur masyarakat patriarkal. Kedua sistem ini, kapitalis dan patriarkal menempatkan wanita pada posisi yang terdominasi dan semakin tereksplorasi dalam sistem kapitalis.

3. Wanita Bekerja di Indonesia

Fenomena wanita bekerja di Indonesia cenderung terlihat di kalangan ekonomi rendah terutama di pedesaan. Adapun yang mendorong mereka bekerja terutama disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga. Indonesia merupakan negara agraris, pada dekade 1960-an sektor pertanian pernah menempati posisi teratas dalam penyerapan tenaga kerja wanita, bahkan sebagian besar pekerjaan di sektor pertanian ini dikuasai oleh pekerja wanita. Pekerjaan lelaki di sektor ini umumnya terbatas pada masa pengolahan lahan, sedangkan pada tahap merawat sampai memetik hasil pertanian sebagian besar dikerjakan kaum wanita. Pada era ini kedudukan wanita pekerja tidak terlalu di persoalkan, karena pekerjaan di sektor pertanian kurang menuntut pencurahan waktu yang terus menerus serta dapat dilakukan dilingkungan domestik, sehingga tidak mengganggu tugas kerumahtanggaan, tidak menuntut adanya pendidikan dan ketrampilan khusus, berarti diferensiasi pekerjaan kurang

mempengaruhi upah yang diterima. Pada dekade 1970-an, ketika mekanisasi melanda di sektor ini, banyak jenis pekerjaan yang semula merupakan lapangan pekerjaan bagi wanita beralih menjadi pekerjaan lelaki, karena pemakaian mekanisasi dan teknik modern di sektor pertanian memerlukan cara pengerjaan yang dianggap lebih pantas untuk dikerjakan oleh kaum lelaki. Sehingga terjadi penurunan drastis dalam penyerapan tenaga kerja wanita di sektor ini.

Turunnya daya serap sektor pertanian terhadap tenaga kerja wanita mendorong wanita untuk terpaksa bekerja di sektor publik terutama di sektor industri. Hal ini dimungkinkan karena pengembangan industrialisasi di Indonesia masih diorientasi pada usaha padat karya, agar sektor industri dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Berbeda dengan sektor pertanian maka di sektor industri ada hirarki jenis pekerjaan dan upah berdasarkan skill. Pada struktur kerja primer, seseorang memperoleh ganjaran yang lebih baik, adanya promosi jabatan, hanya untuk dapat memasuki sektor primer ini seseorang harus memiliki pendidikan, skill/ ketrampilan khusus serta terikat pada peraturan dan disiplin kerja yang ditetapkan, terutama masalah waktu bekerja. Sedangkan sektor sekunder, biasanya ditandai dengan pekerjaan yang tidak memerlukan ketrampilan khusus dan berupah rendah, kadang kala bersifat musiman.

Pekerja wanita kelas rendah karena umumnya tidak memiliki pendidikan dan ketrampilan khusus mereka cenderung bekerja di sektor sekunder tersebut. Peran di dalam keluarga juga masih membelenggu mereka sehingga waktu yang tercurah untuk bekerja di sektor publik ini tidak sepenuhnya. Akibatnya upah yang rendah akan semakin rendah karena produktifitasnya rendah. Biasanya pekerjaan di sektor ini diupah berdasarkan jam kerja atau jumlah produksi barang yang dihasilkan, sehingga ketika wanita harus cuti untuk tidak bekerja karena tugas kerumahtanggaan maka ia tidak memperoleh upah.

Sektor industrialisasi ini khususnya dalam sistem kapitalis sangat peka terhadap fluktuasi pasar, sehingga jenis, jumlah barang yang diproduksi sangat tergantung kepada permintaan pasar, sebagai pekerja musiman dan disektor sekunder

posisi pekerja wanita sangat tergantung kepada perkembangan dan fluktuasi pasar ini. Jika krisis/resesi ekonomi melanda dimana pabrik harus mengurangi barangnya serta mengurangi pekerjanya maka pertama kali yang menjadi korban adalah pekerja musiman dan pekerja di sektor sekunder yang sebagian besar terdiri dari kaum wanita.

4. Wanita dan Struktur Sosial di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, mengakui sepenuhnya kesamaan derajat manusia dan tidak mentolerir adanya eksploitasi/dominasi suatu golongan terhadap golongan manusia lainnya, memang dominasi suatu golongan terhadap golongan lainnya merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Karena manusia pada dasarnya adalah sama, namun struktur sosial lah yang menyebabkan mereka ter-stratifikasi di dalam hubungan sosialnya. Marx mengemukakan bahwa struktur ekonomi yang menyebabkan munculnya kelas sosial. Namun dalam melihat kasus di Indonesia ini penulis cenderung menyimpulkan bahwa struktur sosial masyarakat yang bersifat patriarkal sebenarnya yang membentuk kelas sosial dan mewarnai pola hubungan sosial di dalam masyarakat terutama antara wanita dan lelaki. Secara implisit di Indonesia posisi lelaki lebih menguntungkan dari wanita, wujud konkritnya terlihat pada pembagian peran/tugas antara lelaki dan wanita dalam keluarga.

Peran lelaki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah serta wanita sebagai ibu rumah tangga, ternyata menempatkan wanita pada posisi yang kurang menguntungkan, karena ketika orang tua akan memutuskan untuk membiayai pendidikan anaknya umumnya kaum lelaki yang mendapat prioritas utama untuk memperoleh pendidikan yang tinggi untuk bekal menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah yang baik. Sedang wanita kurang perlu mendapat pendidikan tinggi karena nantinya juga harus bertugas di rumah, kembali ke rumah mengurus keluarga, persepsi ini yang merugikan kaum wanita karena dianggap kurang penting memperoleh pendidikan yang tinggi. Posisi wanita akan kurang menguntungkan dan

semakin tidak menguntungkan jika ia berperan ganda, dimana ia harus bersaing dengan kaum pria yang dari segi pendidikan dan pencurahan waktu ke sektor publik sudah unggul dari kaum wanita.

Ketimpangan kelas berdasarkan jenis kelamin ini sepertinya kurang dipersoalkan di Indonesia karena sistem masyarakatnya yang bersifat patriarkal membenarkan hal ini berlangsung. Bahkan hal ini dianggap wajar karena pembagian peran kedua jenis kelamin ini memang dipersiapkan sesuai dengan nilai-nilai kodratnya masing-masing. Selama struktur masyarakat patriarkal ini masih bertahan, maka selama itu pula wanita akan tetap menjadi warga “kelas dua” di dalam kehidupan sosial ekonominya, lantas upaya apa yang harus dilakukan agar dapat mengangkat derajat wanita, untuk mampu menjadi mitra sejajar kaum lelaki ? Melihat persoalan ini ternyata bukan hanya sekedar persoalan sektoral dalam arti wanita di sektor domestik dan lelaki di sektor publik. Tetapi ternyata lebih tertuju pada persoalan struktural, yakni persepsi struktur sosial yang bersifat patriarkal yang telah mengakar di dalam masyarakat Indonesia yang perlu diubah.

RANGKUMAN

Peran ganda wanita tidak akan menempatkan wanita pada posisi yang semakin terdominasi jika diimbangi oleh adanya peran ganda pria. Berarti harus ada perubahan struktural, dimana sistem patriarkal yang cenderung “menganak emaskan” lelaki harus ditinjau kembali. Peran wanita dan lelaki tidak lagi dipisahkan secara dikotomis, tetapi perlu adanya pembagian peran yang saling menguntungkan, karena pada hakekatnya terselenggaranya kehidupan keluarga dengan segala faktor sosial ekonomi yang mendukungnya menjadi tanggungjawab bersama. Akhirnya jika ada peran ganda wanita maka ada juga peran ganda pria, sehingga wanita dan pria dapat saling mengembangkan diri dan potensi yang dimilikinya, tidak terikat oleh struktur sosial yang tidak menguntungkan, dengan demikian wanita dan pria akan menjadi

sumber daya manusia yang potensial dan bermanfaat bagi terselenggaranya keberlangsungan hidup keluarga, bangsa dan negara.

EVALUASI

Berbentuk soal esay:

1. Jelaskan masalah wanita di Indonesia
2. Jelaskan apa saja faktor penyebab masalah wanita di Indonesia
3. Jelaskan program yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah dan meminimalisir masalah wanita di Indonesia
4. Jelaskan pengaruh struktur sosial terhadap timbulnya masalah wanita di Indonesia

14. Kegiatan Belajar 14-15

1. Learning Outcome:
2. Standar Kompetensi
Menjelaskan struktur sosial masyarakat lokal Indonesia
(Kasus Masyarakat Minangkabau)
3. Kompetensi Dasar
 1. Menjelaskan struktur sosial masyarakat Minangkabau
 2. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi struktur sosial dalam masyarakat Minangkabau
 3. Menjelaskan peran struktur sosial terhadap masyarakat Minangkabau
 4. Menjelaskan masalah-masalah struktur sosial masyarakat Minangkabau
 5. Uraian Materi

STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT MINANGKABAU

1. Pendahuluan

Masyarakat Minangkabau merupakan bagian suku bangsa Indonesia, yang dalam pola kekerabatan menganut sistem matrilineal. Sistem matrilineal berdasarkan kepada ikatan garis keturunan melalui garis ibu. Merujuk kepada garis keturunan ibu tersebut, saudara perempuan di tempatkan sebagai penerus garis keturunan kesukuan, dalam hal ini termasuk penerus atau penerima dari berbagai bentuk warisan material maupun yang bersifat adat-sitiadat. Disisi lain, kaum laki-laki ditempatkan sebagai pengelola dan penjaga harta warisan material yang disebut *Pusako*. Sementara itu, dalam jabatan ke-adatan (jabatan menurut adat), kedudukan laki-laki bertindak sebagai penghulu dan ninik mamak. Dalam pewarisan gelar jabatan menurut adat diwariskan dari penghulu atau mamak kepada kemenakan yaitu anak laki-laki dari saudara perempuan mereka (Simulie, 2002: 28).

Kaum laki-laki yang menjabat dalam adat menurut pola kekerabatan matrilineal disebut dengan istilah elit adat. Para penghulu dan ninik mamak atau mamak adalah kelompok elit adat dalam kekerabatan matrilineal. Berdasarkan adat Minangkabau (Hakimi; 1985: 20) elit adat sangat berperan dalam mengontrol dan mengatur pola kehidupan bermasyarakat menurut aturan adat istiadat, baik adat istiadat yang bersifat *adat salingka nagari* (Adat yang berlaku di tiap-tiap nagari) di Minangkabau.

Wilayah Minangkabau pada masa lalu terdiri dari federasi nagari-nagari. Gabungan dari berbagai nagari-nagari inilah berdirinya kerajaan Minangkabau, sebab itu ada istilah adat salingka nagari (adat tersebut hanya berlaku di dalam nagari itu saja, tidak universal). Artinya adat setiap nagari otonom milik nagari, akan tetapi bukan berarti tidak pula ada persamaan diantara nagari-nagari tersebut (Sayuti, 2002:17).

Manan (1985:30) menjelaskan bahwa nagari merupakan suatu birokrasi pemerintahan terkecil di Minangkabau. Setiap nagari memiliki hak otonom, baik dari segi sistem sosial, politi, ekonomi dan kesenian. Perkembangan nagari terletak pada kerjasama antara elit adat (Pemangku jabatan adat) dan masyarakat yang terdiri dari berbagai kaum dan suku. Nagari dalam wilayah Minangkabau memiliki identitas dan fokus kebudayaan masing-masing. Dari segi produk budaya, nagari diberi wewenang untuk memproduksi secara kolektif (komunal) bentuk-bentuk budaya yang mereka inginkan, yang sesuai dengan karakteristik perilaku dan kepribadian mereka. Salah satu produk budaya tersebut adalah kesenian. Di samping sistem organisasi sosial dan adat-istiadat. Kesenian yang ditumbuhkembangkan di Minangkabau dari berbagai nagari-nagari, merupakan manifestasi dan refleksi dari kehidupan orang Minangkabau sebagai makhluk sosial. Akibat adanya perombakan sistem politik di Indonesia, maka secara tidak langsung ikut mempengaruhi struktur birokrasi pemerintahan adat di Minangkabau. Kenyataan ini diawali oleh keinginan pemerintah pusat (Jakarta) untuk menyeragamkan pengistilahan bagi daerah birokrasi pemerintahan terkecil dari seluruh Indonesia. Pada tahun 1980 seluruh daerah

pemerintahan paling rendah diperkotaan berubah nama menjadi kelurahan, sementara di kabupaten menjadi desa.

Dampak dari perubahan tersebut, menimbulkan sistem pemerintahan Nagari sebagai birokrasi terkecil tidak ada lagi di Minangkabau. Adanya perubahan tersebut berdampak pula pada sistem budaya di Minangkabau. Nagari terpecah-pecah menjadi desa atau kelurahan. Identitas budaya tidak lagi milik nagari, tetapi sudah menjadi milik banyak desa dan kelurahan. Elit adat pun terpecah-pecah dalam jabatannya. Semula hanya sebagai *Datuk Panungkek* (wakil penghulu), sekarang menjadi penghulu pucuk (penghulu pucuk/pemimpin penghulu). Masalah ini disebabkan karena tempat tinggal mereka sudah menjadi dua kekuasaan pemerintahan yang setara, yakni sudah menjadi desa-desa dari satu nagari, terkadang satu nagari menjadi empat desa atau kelurahan. Secara tidak langsung tentu ke-empat desa atau kelurahan harus memiliki sistem budaya maupun sistem pemerintahan adat masing-masing pula. Bagaimanapun juga, kenyataan tersebut berdampak pula terhadap aktivitas maupun kelestarian atau pewarisan dari tari-tari tradisional yang terdapat di berbagai nagari di Minangkabau.

1. Bentuk Kemasyarakatan di Minangkabau

Desa yang disebut nagari dalam Bahasa Minangkabau kadang-kadang terdiri dari dua bagian utama, yaitu daerah *nagari* dan daerah *taratak*. Nagari ialah daerah kediaman utama dan dianggap pusat bagi sebuah desa. Halnya berbeda dengan Taratak yang dianggap sebagai daerah hutan dan ladang. Kalau ada orang yang diam di taratak ini, maka orang itu dianggap sebagai orang yang bertugas menjaga dan mengerjakan tanah yang ada di situ dan biasanya tanah itu bukan kepunyaannya (Junus, 1971:251).

Daerah nagari dalam sebuah desa biasanya ditentukan oleh adanya sebuah mesjid, sebuah balai adat, dan tempat untuk pasar sekali atau dua kali seminggu. Mesjid, balai adat tempat sidang-sidang adat diadakan, pasar dan kantor kepala nagari sebagai gejala yang dibawa oleh pemerintahan Belanda biasanya terletak pada suatu

tempat yang merupakan pusat kehidupan sebuah desa, dan pada pertengahan sebuah jalan memanjang dengan rumah-rumah kediaman di sebelah kiri dan kanannya.

Daerah nagari dalam sebuah desa pertanian, meliputi juga daerah persawahan. Ladang-ladang biasanya tidak ada di dalam daerah ini, tetapi dalam daerah taratak, walaupun di situ sering juga terdapat sawah-sawah. Keadaan semacam ini kiranya cocok dengan pengertian lain dari Taratak sebagai daerah yang terpencil dari pusat nagari, yang berpeccaran di sudut-sudut yang agak jauh dari nagari.

Kecuali kelompok-kelompok kekerabatan seperti paruik, kampueng dan suku, masyarakat Minangkabau tidak mengenal organisasi-organisasi masyarakat yang bersifat adat yang lain. Demikian instruksi-instruksi dan aturan pemerintah, soal administratif masyarakat pedesaan seringkali disalurkan kepada penduduk desa melalui penghulu suku dan penghulu andiko.

Sebuah suku, di samping mempunyai seorang panghulu suku, juga mempunyai seorang *dubalang* dan *manti*. Dubalang bertugas menjaga keamanan sebuah suku, sedangkan mantin berhubungan dengan tugas-tugas keamanan. Adapun kampueng sebagai kesatuan yang lebih kecil daripada suku.

Dalam beberapa masyarakat, seorang panghulu suku dipilih, meskipun dari suku-suku tertentu, sedangkan pada masyarakat lain panghulu menjadi hak yang hanya dimiliki oleh sebuah keluarga saja dalam sebuah suku tertentu. Kalau keluarga ini habis atau punah, hak baru dapat pindah kepada keluarga lain. Keadaan ini dapat dikatakan berhubungan dengan ada atau tidaknya stratifikasi sosial yang keras dalam masyarakat itu.

2. Struktur Kepemimpinan Masyarakat Minangkabau

Struktur kepemimpinan masyarakat Minangkabau memiliki karakteristik yang berdeda dan memiliki kekhasan dibanding dengan masyarakat lain yang ada di Indonesia.



Sesungguhnya struktur masyarakat adat Minangkabau yang berciri Matrilineal (atau dari garis ibu), diawali dari dalam rumah tangga. Rumah tangga atau dalam Bahasa Minang disebut sebagai *rumah tanggo*, dipimpin oleh kepala keluarga (suami) yang disebut *Urang Sumando*.

Tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu *Samande* (hubungan yang terkait antara rumahtangga-rumahtangga di antara saudara-saudara yang berasal dari satu ibu yang sama). Oleh sebab itu disebut samande atau satu ibu. Struktur ini dipimpin oleh seorang *mamak rumah*. Mamak rumah adalah saudara lelaki dari para anak perempuan. Di rumah ibunya, lelaki tadi bertindak sebagai pemimpin bagi saudara-saudara perempuannya dan keponakan-keponakannya. Ia bertugas mengurus, memberi wejangan dan membantu perikehidupan saudara perempuan beserta anak-kemenakannya. Namun, bagi keluarga istrinya, lelaki tadi menjadi urang sumando.

Tungganai adalah tingkat kepemimpinan yang lebih tinggi lagi, yaitu pemimpin dari beberapa hubungan *samande* yang membentuk *sajurai*. Jurai ini adalah kumpulan beberapa keluarga yang berasal dari satu ibu, memiliki keturunan hingga generasi ketiga. Peran *tungganai* sama dengan mamak rumah, tetapi dengan cakupan yang lebih luas. Kumpulan *sajurai* membentuk hubungan keluarga *saparuiik* (satu perut). Hubungan keluarga ini berasal dari satu ibu kemudian berkembang hingga generasi keempat, yaitu ibu, anak, cucu, cicit. Saparuiik dipimpin oleh seorang

Tuo Kampuang (Tetua kampung). Kumpulan saparuik-saparuik membentuk *suku*. Suku ini dipimpin oleh *Penghulu Andiko*, yaitu seorang pria yang terbaik yang dipilih dari mamak rumah-mamak rumah yang ada, yang diyakini akan mampu memimpin dan membawa sukunya menjadi lebih maju dan sejahtera. *Penghulu Andiko* ini diangkat dengan suatu proses yang disebut *Batagak Panghulu*. kepadanya diberikan sebuah gelar *Datuk* oleh suku atau kaumnya.

Suku-suku yang ada kemudian bergabung menjadi *empat suku*, dan dipimpin oleh seorang *penghulu puncak suku*. Kumpulan empat suku-empat suku membentuk *sudut* dan dikepalai oleh *penghulu puncak sudut*. Sudut-sudut kemudian membentuk sebuah *nagari*. Nagari ini dipimpin oleh seorang *penghulu puncak adat*.

RANGKUMAN

Sesungguhnya struktur masyarakat adat Minangkabau yang berciri Matrilineal (atau dari garis ibu), diawali dari dalam rumah tangga. Rumah tangga atau dalam Bahasa Minang disebut sebagai *rumah tanggo*, dipimpin oleh kepala keluarga (suami) yang disebut *Urang Sumando*. Tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu *Samande* (hubungan yang terkait antara rumahtangga-rumahtangga di antara saudara-saudara yang berasal dari satu ibu yang sama). Oleh sebab itu disebut samande atau satu ibu. Struktur ini dipimpin oleh seorang *mamak rumah*. Mamak rumah adalah saudara lelaki dari para anak perempuan. Di rumah ibunya, lelaki tadi bertindak sebagai pemimpin bagi saudara-saudara perempuannya dan keponakan-keponakannya. Ia bertugas mengurus, memberi wejangan dan membantu perikehidupan saudara perempuan beserta anak-kemenakannya. Namun, bagi keluarga istrinya, lelaki tadi menjadi *urang sumando*.

EVALUASI

Berbentuk soal esay:

1. Jelaskan struktur sosial masyarakat lokal Minangkabau
2. Jelaskan apa saja faktor pembentuk struktur sosial masyarakat Minangkabau

3. Jelaskan apa saja bentuk-bentuk struktur sosial masyarakat Minangkabau
4. Jelaskan pengaruh struktur sosial terhadap timbulnya masyarakat Minangkabau

DAFTAR RUJUKAN

1. Amirin, Tatang. M. (1996). *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: Rajawali Pers
2. Fauzi, Ridjal dkk (1993). *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
3. Johnson, Doyle Paul (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1*. Diterj : Robert, M.Z, Lawang. Jakarta: PT. Gramedia
4. Kartika, Sandra dkk (1999). *Dari Keseragaman menuju Keberagaman: Wacana Multikultural dalam Media*. Yogyakarta: LSPP
5. Lawang, Robert. M.Z (1985. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Karunika
6. Nasikun. (1995). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
7. Radjab, Muhammad. (1969). *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Padang: CMSP.
8. Soekanto, Soerdjono. 1993. *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
9. Mutakin, Awan (1998) *Studi Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Depdikbud
10. Widjaya. A.W (1986), *Manusia Indonesia Individu, Keluarga dan Masyarakat*, Jakarta: Akademika Pressindo

Catatan:

Sumber-sumber lain akan dilengkapi dalam proses perkuliahan sejalan dengan pembahasan topik-topik tertentu.

